

SKRIPSI
ANALISIS PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI IBUKOTA KABUPATEN
PINRANG



Oleh:

MUH.HIKMAL

No Induk Mahasiswa : 105611107020

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

**ANALISIS PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI IBUKOTA KABUPATEN
PINRANG**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Dan Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh

MUH.HIKMAL

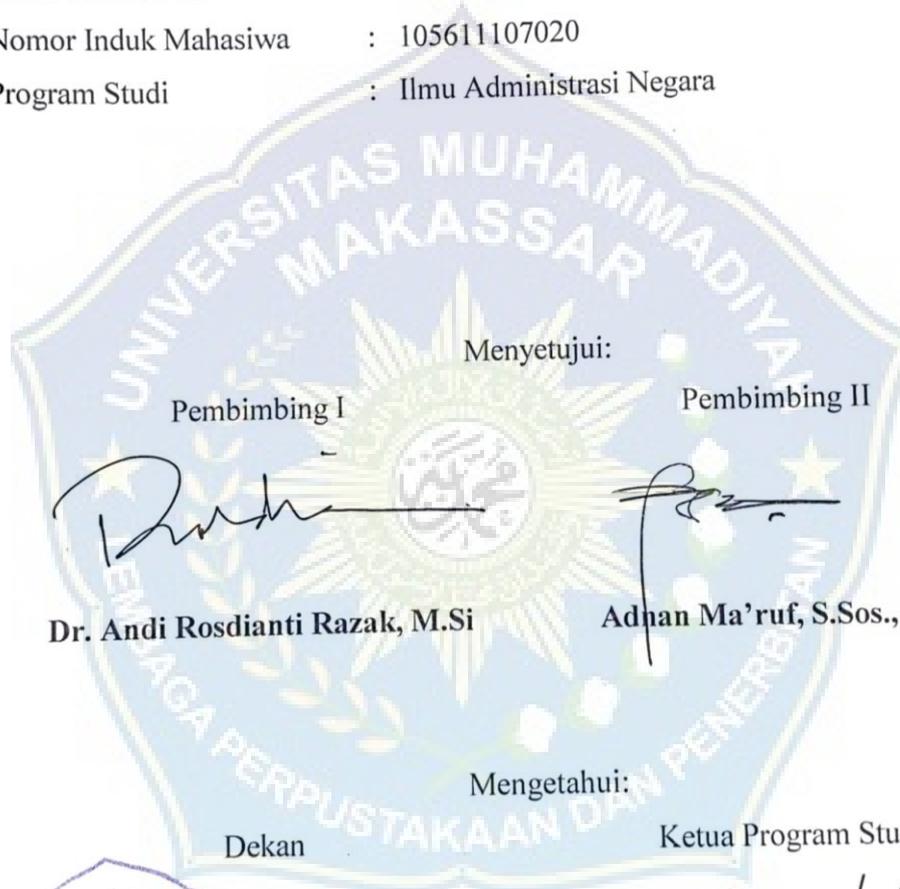
No Induk Mahasiswa : 105611107020

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

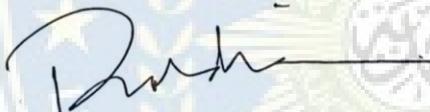
Judul Skripsi : Analisis Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi
Gelandangan dan Pengemis di Ibu Kota Kabupaten
Pinrang
Nama Mahasiswa : Muh. Hikmal
Nomor Induk Mahasiswa : 105611107020
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si


Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM: 991742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0270/FSP/A.4-II/V/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari selasa tanggal 30 bulan Mei tahun 2024

Mengetahui:

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992797

Tim Penguji:

1. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si

()

2. Dr. Jaelani Usman, M.Si

()

3. Dr. Abdi, M.Pd

()

4. Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si

()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Hikmal

Nomor Induk Mahasiswa 105611107020

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 21 Desember 2023

Yang Menyatakan,



Muh. Hikmal

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Ibukota Kabupaten Pinrang**”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang penulis ajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ucapan terima kasih pertama-tama penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis yaitu bapak Nasir dan Ibu Almarhumah Jarah, yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta doa-doa yang tiada hentinya diberikan kepada penulis agar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk segala urusannya. Terima kasih juga atas perjuangan dan pengorbanannya.

Banyaknya rintangan dan tantangan yang penulis hadapi dalam penyelesaian skripsi ini membuat penulis menyadari bahwa semua ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang selalu mengarahkan penulis untuk mencapai dan memperoleh kebenaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si., selaku Pembimbing I, dan Bapak Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si., selaku Pembimbing II, yang dengan kebesaran dan kesabaran hati telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai harapan.
2. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara, dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.Ap., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara.
4. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu, memberikan solusi, serta berbagi ilmu kepada penulis.
5. Para pihak di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, termasuk gelandangan maupun masyarakat, yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam melakukan penelitian.
6. Kakak perempuan saya, Hermin dan Bella Adriani, yang senantiasa dapat menggantikan peran sosok ibu bagi penulis.
7. Keluarga besar Jemmer Squad yang selama ini senantiasa kebersamai serta memberi dukungan kepada penulis.
8. Seluruh teman-teman kelas IAN B20 yang selalu kebersamai selama masa perkuliahan, memberikan cerita, dan berbagi pengalaman.

9. Dan terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri. Terima kasih atas segala kerja keras dan semangat sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 15 Mei 2024

Penulis

Muh. Hikmal



ABSTRAK

MUH HIKMAL. Analisis Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Ibukota Kabupaten Pinrang

Gelandangan dan pengemis sering disebutkan dengan kata gepeng, dan gepeng merupakan turunan dari istilah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kehadiran gepeng dipengaruhi oleh berbagai faktor yang perlu ditangani oleh pemerintah melalui Dinas Sosial agar jumlah mereka tidak terus bertambah dalam jangka waktu yang lama.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan yang berupa penyusunan perencanaan, pemberian pengarah, pemberian bimbingan dan pemberian pelatihan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskripsi kualitatif. Adapun sumber data didapatkan dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pinrang masih belum efektif. Hasil penelitian yang dilakukan penulis, terungkap bahwa peran Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pinrang masih belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Meskipun telah dilakukan perencanaan oleh Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang, hasil yang diperoleh tidak memenuhi ekspektasi. Pemberian pengarah tanpa didukung oleh bimbingan dan pelatihan yang memadai menyebabkan gelandangan dan pengemis tetap berada di jalanan. Tidak adanya rumah singgah juga menjadi kendala utama yang menghambat peran Dinas Sosial dalam menangani masalah ini.

Kata Kunci : Peran Penanganan, Kebijakan, Gelandangan dan Pengemis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ixii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II PEMBAHASAN.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Teori dan konsep.....	15
C. Kerangka Berpikir	46
D. Fokus Penelitian	49
E. Deskripsi Fokus Penelitian	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	52
B. Jenis dan Tipe Penelitian	52
C. Informan Penelitian	53
D. Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Teknik Analisis Data.....	55

G.	Teknik Pengabsahan Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		57
A.	Deskripsi Objek Penelitian.....	57
B.	Hasil Penelitian.....	68
C.	Pembahasan.....	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		99
A.	Kesimpulan.....	99
B.	Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....		101
LAMPIRAN.....		104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol dengan baik dan efektif dapat memunculkan beberapa masalah diantaranya kemiskinan. Kemiskinan sendiri merupakan suatu kondisi dimana seorang individu tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dalam hidupnya baik itu dari segi ekonomi, sosial budaya, serta partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan kurangnya jumlah lapangan pekerjaan. Kemiskinan menjadi masalah yang menakutkan dalam masyarakat. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengatasi kemiskinan, namun angka kemiskinan tetap tinggi. Banyak orang masih berisiko menjadi miskin lagi, sehingga upaya untuk mengentaskan kemiskinan belum berhasil. Selama ini, pendekatan yang digunakan dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia hampir selalu berfokus pada aspek ekonomi seperti pembangunan infrastruktur, bantuan kredit, dan bantuan pendidikan serta kesehatan. Padahal, kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan melibatkan berbagai sumber daya, termasuk modal social (Nasution, 2017).

Masalah sosial yang sulit untuk dihindarkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah gelandangan dan pengemis, apalagi yang berada di perkotaan. Permasalahan ini merupakan akibat dari akumulasi dan interaksi dari berbagai macam masalah seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, keterampilan kerja yang kurang, lingkungan sosial dan budaya, kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu masalah yang timbul akibat permasalahan ini antara lain,

dengan adanya gelandangan dan pengemis yang berada di tempat umum akan menyebabkan masalah lingkungan, masalah kependudukan, masalah keamanan dan ketertiban, dan masalah kriminalitas. Dalam konteks ini, kemiskinan merupakan masalah sosial yang berskala global dan menjadi perhatian banyak orang di seluruh dunia. Kemiskinan juga dianggap sebagai permasalahan kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan kemajuan peradaban (Suharto, 2009).

Kemiskinan yang menjadi isu utama bagi pemerintah mengakibatkan munculnya populasi gelandangan dan pengemis. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1980 mengenai Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, gelandangan adalah individu yang menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak memiliki tempat tinggal, dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan, pengemis adalah orang yang mencari penghasilan dengan cara meminta-minta di tempat umum menggunakan berbagai alasan dengan harapan mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka berasal dari kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang kemudian terpaksa melakukan aktivitas di jalanan, seperti mengemis atau mengamen.

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengatur mengenai penanggulangan gelandangan dan pengemis melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Adapun hal yang menimbang dalam pembuatan

PP ini antara lain gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena itu perlu diadakan berbagai usaha penanggulangan, dan bahwa usaha penanggulangan tersebut disamping usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis, agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang warga Negara Republik Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 juga mengatur usaha yang dilakukan yang tertuang pada Bab III mengenai usaha preventif, bab IV mengenai usaha Represif, bab V mengenai usaha Rehabilitatif, dan bab VI mengenai partisipasi masyarakat. (Fatmawati.L et al., 2021).

. Hingga saat ini, pemerintah telah berusaha menangani masalah gelandangan dan pengemis, namun seringkali penanganannya tidak tepat, yang mengakibatkan permasalahan sosial terkait terus berlanjut bahkan semakin memburuk (Hamidah, 2019). Oleh karena itu, pendekatan yang lebih baik dalam penanganan gelandangan dan pengemis adalah mengarahkan mereka menuju pemahaman tentang norma-norma umum yang berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih normal.

Permasalahan gelandangan dan pengemis bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah di kota-kota besar, melainkan juga menjadi perhatian pemerintah daerah di kota-kota kecil yang harus menghadapi tantangan menangani masalah gelandangan dan pengemis di jalan-jalan, yang

disebabkan oleh tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Aktivitas mengemis seringkali dipicu oleh masalah ekonomi yang mendesak. Karena tekanan kebutuhan ekonomi yang tinggi, masyarakat terpaksa mencari solusi, bahkan jika itu berarti mereka harus menjadi pengemis (Zamharira & Arantika, 2018). Salah satu contoh daerah di Sulawesi Selatan yang menghadapi masalah serupa adalah Ibukota Kabupaten Pinrang. Di Ibukota Kabupaten Pinrang, jumlah pengemis terus bertambah dari waktu ke waktu. Mereka dapat ditemukan di berbagai tempat seperti persimpangan lampu lalu lintas, warung kopi, terminal, pusat perbelanjaan, dan area yang ramai lainnya. Secara fisik, gelandangan dan pengemis berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, tetapi sebenarnya mereka terisolasi karena terbatasnya akses mereka terhadap fasilitas yang ada. Banyak dari mereka yang sebenarnya masih dalam keadaan sehat, namun mereka memilih untuk menjadi gelandangan dan pengemis karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, kurangnya pendidikan dan keterampilan, serta arus urbanisasi.

Kurangnya keterampilan di kalangan penduduk perkotaan dan persaingan yang sengit telah mendorong sebagian dari mereka untuk akhirnya memilih menjadi pengemis dan gelandangan di Ibukota Kabupaten Pinrang. Gelandangan dan pengemis dengan mudah dapat ditemui di berbagai lokasi di daerah ini, seperti pusat perbelanjaan seperti Mall Of Pinrang Sejahtera, area parkir umum, pasar, bahkan di depan pintu minimarket-minimarket sekalipun. Masyarakat merasa khawatir terhadap perilaku beberapa gelandangan pengemis, yang terkadang bersikeras dan sulit pergi jika mereka tidak

mendapatkan apa yang mereka inginkan, meskipun tidak diberi uang. Dampak dari peningkatan jumlah gelandangan pengemis ini mencakup ketidaktaatan sosial, ketidaknyamanan, ketidaksiplinan, dan gangguan terhadap estetika kota.

Adapun kebijakan pemerintah Ibukota Kabupaten Pinrang melalui dinas sosial dan Satpol PP Melakukan penertiban Gelandangan dan Pengemis di Beberapa wilayah di Ibukota Kabupaten Pinrang, Gelandangan dan Pengemis yang terjaring akan diberikan langkah persuasif dengan menelusuri keberadaan dan mengembalikan kepada keluarganya untuk dibina lebih lanjut. Selain itu pihak dinas sosial dan satpol PP juga melibatkan pihak kementerian agama kabupaten Pinrang untuk memberikan bimbingan keagamaan kepada mereka sebelum dikembalikan kepada pihak keluarga.

Keberadaan gelandangan dan pengemis sangat menimbulkan permasalahan yang pelik, dimana dengan adanya para pengemis yang biasanya terlihat di tempat umum bisa menimbulkan masalah sosial seperti masalah keamanan dan ketertiban, terganggunya para pengguna jalan dalam berlalu lintas, bahkan sampai menyebabkan kecelakaan karena biasanya pada setiap lampu merah para pengemis berjalan sampai ditengah jalan. Selain keberadaan para pengemis ditempat umum, biasanya mereka tidak memiliki tanda pengenal seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) yang terdaftar di RT dan RW yang ada di daerah setempat. Para pengemis biasanya tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, mereka sering berpindah-pindah tempat tinggal misalnya untuk istirahat atau tidur di emperan toko, taman, pasar dimana mereka merasa nyaman.

Peran Pemerintah sangat diharapkan dalam menangani masalah pengemis yang setiap tahun meningkat di negara ini. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 dimana dinyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Selain itu ditegaskan juga dalam Pasal 27 Ayat (2) "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Sesuai dengan penegasan undang-undang ini jelas bahwa negara dalam hal ini pemerintah harus bertanggung jawab dalam menangani permasalahan pengemis yang menimbulkan masalah sosial (Djaafar et al., 2022). Serta dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Fakirmiskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Semakin dilengkapi juga dalam pasal 28 H: (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Adapun peran Pemerintah kota, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pinrang, sangatlah penting dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kondisi sosial masyarakatnya tetap terjaga dengan baik, termasuk dalam upaya mengatasi kemiskinan dan permasalahan sosial yang terkait seperti gelandangan dan pengemis. Mereka memiliki peran dalam menyediakan dukungan kebijakan, sumber daya, dan koordinasi antarinstansi untuk penanganan masalah ini. Dinas Sosial Kabupaten Pinrang memiliki peran khusus dalam menjalankan program-program penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial. Dinas ini berperan sebagai pelaksana program, mengidentifikasi individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan,

menyusun program-program rehabilitasi sosial, dan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas program-program yang telah diimplementasikan. Untuk itu pemerintah khususnya Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang perlu memperhatikan penanganan bagi mereka yang memiliki kehidupan yang kurang layak khususnya Gelandangan dan Pengemis yang masih berkeliaran di Ibukota Kabupaten Pinrang.

Oleh karena itu, pemahaman yang lebih dalam tentang peran Dinas Sosial dan kerjasama dengan pemerintah kota sangat penting untuk memastikan bahwa upaya penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pinrang dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Penelitian ini akan menggali secara lebih mendalam peran Dinas Sosial dan mengidentifikasi kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang upaya penanganan masalah sosial ini dan memberikan rekomendasi yang konkret untuk perbaikan dalam hal ini.

Dalam konteks penelitian ini, analisis yang mendalam tentang peran Dinas Sosial akan membantu dalam merancang strategi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah ini. Pemahaman yang lebih baik tentang peran dan kebijakan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam menjalankan tugasnya juga akan membantu dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pinrang. Dengan memahami peran Dinas Sosial dalam konteks Kabupaten Pinrang yang khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

wawasan yang berharga bagi pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan upaya penanganan masalah gelandangan dan pengemis. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi kontribusi penting dalam literatur mengenai penanganan masalah sosial di tingkat lokal, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang dinamika sosial di masyarakat Indonesia pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu bagaimana peran Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Ibukota Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Ibukota Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

Analisis Peran dinas sosial dalam Menanggulangi gelandangan dan pengemis di Ibukota Kabupaten Pinrang dapat membantu mengidentifikasi upaya konkret yang dilakukan oleh dinas tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan, bantuan, dan rehabilitasi kepada gelandangan serta pengemis, sehinggamereka dapat meninggalkan jalanan dan mengakses sumber daya yang diperlukan untuk kehidupan yang lebih layak. Analisis ini juga dapat membantu membantu mengukur efektivitas program-

program yang telah dilaksanakan oleh dinas sosial serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam rangka mengurangi populasi gelandangan dan pengemis di kota tersebut.



BAB II

PEMBAHASAN

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari penelitian sebelumnya adalah untuk mendapatkan perbandingan dan referensi, selain mengatasi anggapan kesamaan dengan penelitian ini, peneliti memasukkan hasil penelitian sebelumnya ke dalam tinjauan pustaka ini sebagai berikut.

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Sri Sudiarti, Eldzan Izzahara Nasution	Analisis Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Medan (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan)	Dinas Sosial Kota Medan dalam meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi dibidang kesejahteraan sosial, mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggungjawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungan serta memperbaiki kualitas

			<p>hidup dan kesejahteraan</p> <p>Penyandang Masalah</p> <p>Kesejahteraan Sosial</p> <p>dalam rangka</p> <p>meningkatkan pelayanan</p> <p>kesejahteraan sosial bagi</p> <p>masyarakat Kota Medan,</p> <p>Dinas Sosial sebagai</p> <p>Satuan Kerja Perangkat</p> <p>Daerah Kota Medan terus</p> <p>menerus berupaya untuk</p> <p>melakukan perubahan</p> <p>kearah yang lebih baik</p> <p>dalam pelayanan</p> <p>kesejahteraan sosial bagi</p> <p>Penyandang Masalah</p> <p>Kesejahteraan Sosial. Oleh</p> <p>karena itu untuk</p> <p>mewujudkan pelayanan</p> <p>kesejahteraan sosial</p> <p>kepada masyarakat perlu</p> <p>disusun suatu tahapan</p> <p>perencanaan program dan</p>
--	--	--	--

			kegiatan secara konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil (Sudiarti & Nasution, 2022).
2	Dwi Ayu Destiani, Nastia, Muh. Askal Basir	Peran dinas sosial terhadap penanggulangan anak pengemis di kota baubau	Dalam penanganan anak pengemis, Dinas Sosial Kota Baubau melakukan patroli di lampu merah dan tempat-tempat umum dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan. Dinas Sosial Kota Baubau menanyakan tempat tinggal, latar belakang keuangan, asal daerah, pekerjaan, status keluarga, dan yang terpenting mengumpulkan data tentang berbagai permasalahan. Dinas Sosial

			<p>Kota Baubau saat melakukan penangkapan dan selanjutnya dibawah kekantor untuk melakukan pendataan dan diberikan pengarahan-pengarahan tentang larangan melakukan kegiatan mengemis di lampu merah. Dari hasil penelitian tentang pendataan menurut penulis belum mencapai hasil yang di harapkan, dikarenakan belum ada data terkait anak pengemis di Kota Baubau. Pendataan hanya dilakukan saat terjadi kegiatan patroli saja, seharusnya hasil pendataan menjadi rujukan Dinas Sosial Kota Baubau terhadap naik turunnya angka anak pengemis di</p>
--	--	--	---

			Kota Baubau (Destiani et al., 2023).
3	Jaine Christin Andu, Herman Nayoan, Donald K. Monintja /2023	Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Merehabilitasi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Manado	Dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Merehabilitasi Gelandangan dan Pengemis di Kota Manado, maka peneliti akan membahas dengan melihat Kinerja menurut teori Kumorotomo (1996) terkait Efisiensi, Efektivitas, Keadilan, dan Daya Tanggap (Andu et al., 2023) .

Sumber : Review Jurnal 2024

Keterangan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji :

1. Dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti terdapat perbedaan narasumber dan tahun penelitian

2. Lokasi penelitian yang akan diteliti berbeda terhadap penelitian terdahulu.
3. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu

B. Teori dan konsep

1. Teori Kesejahteraan

Mengenai kemiskinan tidak lepas dari suatu permasalahan kesejahteraan, diantaranya dari pengukuran kemiskinan itu sendiri. Pindyck dalam Nuryitmawan (2016: 34) (Rahadi et al., 2014), menjelaskan bahwa kesejahteraan menjadi antitesis dari kemiskinan yang dialami oleh seseorang. Kaitannya kesejahteraan dengan kemiskinan juga tercermin dari pengukuran kesejahteraan menggunakan garis kemiskinan yaitu dengan standar USD \$1 atau USD \$2 perkapita perhari. Semakin besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka akan mencerminkan semakin rendah taraf kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Menurut Rahardjo (2016: 26), pengertian kesejahteraan umum mengacu pada teori utilitarianisme yang bahwa kebenaran adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang (Pandu, 2018: 13). Ahli ekonom Vilfredo Pareto dalam Deliarnov (2010: 111), menyatakan kesejahteraan akan tercapai apabila tercipta situasi optimal. Situasi optimal terjadi apabila tidak ada individu dapat berbuat lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk, di samping itu, pengalokasian sumber daya dikatakan efisien bila kondisi

yang dicapai tidak bisa dicapai lebih baik lagi. Bank Dunia dalam Zailani (2016: 27), bahwa kemiskinan menunjuk situasi pada kekurangan yang nyata dalam kesejahteraan. Karena itu masalah kemiskinan selalu dikaitkan dengan kesejahteraan (Pandu, 2018: 14). Pandu (2018), untuk menilai taraf kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara harus dilakukan pengukuran kesejahteraan.

Pada tataran global terjadi perdebatan mengenai indikator pengukuran atas kesejahteraan mewakili dua kubu dengan pandangan pembangunan yang berbeda. Kubu pertama menilai kesejahteraan harus diukur dari PDB dan pendapatan perkapita. Kubu kedua memandang kesejahteraan harus dilihat dari pembangunan manusia (Rahardjo, 2016: 29). Tetapi Sen dan Ul Haq, menolak PDB sebagai pengukuran kesejahteraan yang dilakukan dengan merancang Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memuat tiga hal yakni pendapatan perkapita, usia harapan hidup, dan angka partisipasi sekolah sebagai alternatif untuk melihat kesejahteraan. Indeks pembangunan manusia memuat pemikiran bahwa rakyat merupakan kekayaan sebenar-benarnya dari sebuah negara dan pembangunan harus membuat lingkungan yang memungkinkan penghuninya untuk menikmati hidup panjang, sehat, dan berdaya cipta (Fiamonti, 2017: 127-129). Amartya Sen dalam Nuryitmawan (2016), menyatakan bahwa asal kesejahteraannya individu adalah kemampuan untuk bisa berfungsi dengan layak dalam masyarakat. Kondisi kesejahteraan yang dimaksud adalah saat terpenuhinya kebutuhan dasar akan gizi, pendidikan, perumahan, penghasilan, kebebasan dalam

memilih, dan mendapat perlindungan dari risiko yang mengancam hidup seseorang (Pandu, 2018: 15).

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa terdapat perbedaan pendapat antar dua pihak mengenai pengukuran kesejahteraan. Di satu pihak kesejahteraan hanya dinilai dari aspek ekonomi semata, dan di pihak kedua ada yang berpendapat bahwa kesejahteraan diukur tidak hanya dengan yang berkaitan dengan masalah ekonomi saja, tetapi juga berkaitan dengan hal lain seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini mempunyai kaitan dengan adanya gepeng, di mana gepeng belum bisa memenuhi kebutuhan dasar akan gizi, pendidikan, perumahan, dan penghasilan yang tetap. Dalam hal tersebut akan membuat seseorang akan terus mengemis apabila tidak adanya kesejahteraan.

2. Kemiskinan

Pandu (2018: 16), terdapat berbagai pengertian mengenai kemiskinan, masing-masing ahli melukiskan masalah kemiskinan secara berbeda. Hal ini diikuti dengan beragamnya pendekatan yang digunakan oleh para ahli dalam memahami kemiskinan. Levitan, bahwa kemiskinan sebagai kekurangan bahan dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai hidup layak (Limbong, 2011: 209). Schiller, bahwa kemiskinan merupakan sebuah ketidakmampuan untuk mendapat barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas (Suyanto, 2013: 2). Kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar yang berkaitan dengan keadaan ekonomi masyarakat itu sendiri. Kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi di mana masyarakat berada

pada tingkat ekonomi yang lemah, dan ditambah kebijakan pemerintah yang sifatnya jangka pendek, sehingga belum dapat menyelesaikan persoalan ekonomi rakyat miskin (Subandi, 2014: 77-78).

Bappenas dalam Arsyad (2010), mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang ataupun kelompok orang untuk menyelenggarakan hidup sampai taraf yang manusiawi. Menurut Suyanto (2013), kemiskinan bukan hanya fenomena ekonomi yang berkaitan dengan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi esensi kemiskinan menyangkut kemungkinan orang untuk mengembangkan usaha serta taraf kehidupannya. John Friedman, berpendapat bahwa kemiskinan merupakan ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial yang dimaksud adalah modal produktif/aset, sumber keuangan, organisasi sosial politik untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, pengetahuan, keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna untuk kehidupan (Suyanto, 2013: 3).

Kemiskinan umumnya dikaitkan dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak dan kemiskinan merupakan kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang disebabkan oleh efek dari kebijakan yang tidak dapat dihindari, merupakan akar kemiskinan, dan mengakibatkan ketidakberdayaan penduduk sehingga membawa gejala kemiskinan yang bersifat multidimensi (Limbong 2011: 211). Dari penjelasan pengertian di atas

dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang mengakibatkan tidak mampu mengakumulasikan aset dan mengakses layanan sosial.

1) Macam-macam kemiskinan

Dalam Pandu (2018: 19), kemiskinan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar dalam hal ini adalah kebutuhan yang meliputi konsumsi pribadi dan kebutuhan pelayanan sosial. Kemiskinan relatif merupakan di mana tinggi rendahnya tingkat kemiskinan ditentukan oleh lingkungan sekitarnya (Arsyad, 2010). Kemiskinan jika ditinjau dari penyebabnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang timbul akibat kelangkaan SDA, kondisi tanah yang tandus, tidak tersedianya irigasi, dan langkanya prasarana lainnya, hal ini merupakan penyebab utama kemiskinan. Sedangkan kemiskinan buatan terjadi karena munculnya kelembagaan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata (Mas'oeed, 2003: 138). Kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu; kemiskinan alami (kultural) dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alami berkaitan dengan

kepemilikan faktor-faktor produksi, tingkat produktivitas, perkembangan masyarakat itu sendiri. Sedangkan kemiskinan struktural merupakan masalah yang timbul dari laju pembangunan dan strategi, serta kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (Subandi, 2014: 78).

Kemiskinan buatan kerap sering disamakan dengan pengertian kemiskinan struktural. Selo Soemardjan dalam Arsyad (2010: 301), menganggap bahwa kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut. Sehingga, membuat masyarakat tidak mampu menikmati sumber pendapatan yang tersedia. Sedangkan menurut Limbong (2011: 221), kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diciptakan oleh sistem yang terorganisasi, sehingga terjadi proses kemiskinan rakyat. Ciri utama kemiskinan struktural adalah tidak terjadinya mobilitas sosial vertikal, kalau adapun sifatnya lamban sekali. Masyarakat miskin akan tetap miskin, sedangkan golongan kaya akan tetap menikmati kekayaannya.

Menurut pendekatan struktural, faktor penyebabnya adalah terletak pada lingkungan struktural yang membuat orang miskin menjadi malas untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Suyanto, 2013: 11). Jeffrey D Sachs, membagi kemiskinan menjadi tiga kategori yaitu kemiskinan ekstrem (absolut), kemiskinan moderat dan kemiskinan relatif. Kemiskinan ekstrem adalah sebuah kondisi dimana rumah tangga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya

dalam mempertahankan hidup. Kondisi rumah tangga yang mengalami kemiskinan ekstrem ditandai dengan kelaparan kronis, tidak mampu mengakses layanan kesehatan, tidak memiliki sumber air, sanitasi yang baik, tidak dapat menjangkau layanan pendidikan, dan mungkin kekurangan perlindungan dasar. Kemiskinan moderat merujuk kondisi dimana rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan dasar saja, dan kemiskinan relatif merupakan pendapatan rumah tangga yang berada di bawah proporsi rata-rata pendapatan nasional (Limbong, 2011: 212).

2) Penyebab Kemiskinan

Dalam Pandu (2018: 22), terdapat banyak hal yang membuat orang menjadi jatuh miskin. Namun, tidak ada jawaban yang mampu untuk menjelaskan mengapa seseorang menjadi miskin secara sekaligus. Fenomena ini ditunjukkan dengan beragamnya pendapat yang mencoba mencari sebab dari kemiskinan. Perbedaan tersebut dikarenakan terdapatnya perbedaan wilayah, potensi alam, dan maupun kondisi tertentu saat mencoba mencari penyebab kemiskinan.

Sharp, et al dalam Subandi (2014: 78), mengidentifikasi tiga penyebab kemiskinan. Menurut mereka, tiga hal tersebut adalah: 1) Secara mikro, kemiskinan timbul karena ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang membuat distribusi pendapatan menjadi timpang; 2) Munculnya kemiskinan disebabkan karena perbedaan kualitas SDM; 3) Adanya perbedaan dalam mengakses

modal. Menurut lembaga penelitian SMERU (2001: 4), kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai persoalan. Diantaranya penyebab kemiskinan terdiri dari: 1) Gagal dalam perolehan hak milik, terutama tanah dan modal; 2) Ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana, dan prasarana yang jumlahnya terbatas; 3) Kebijakan pembangunan yang menyimpang perkotaan; 4) Terdapat perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; 5) Adanya perbedaan SDM dan perbedaan antar sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern); 6) Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya; 7) Tidak adanya good governance; dan 8) Pengelolaan SDA yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Sedangkan menurut ekonom Dorodjatun Kuntjara Jakti, kemiskinan disebabkan oleh kebijakan dalam pembangunan yang tidak seimbang, sehingga menimbulkan dampak pada munculnya kemiskinan, terutama kemiskinan perkotaan (Limbong, 2011: 216).

Ekonom M. Todaro berpendapat bahwa ada beberapa faktor penyebab kemiskinan diantaranya ialah: 1) Perbedaan letak geografis, penduduk, dan pendapatan. 2) Perbedaan sejarah, terutama penjajahan oleh negara yang berlainan. 3) Perbedaan SDA dan SDM. 4) Perbedaan negara dan swasta. 5) Perbedaan struktur industri. 6) Perbedaan tingkatan, ketergantungan pada kekuatan ekonomi, dan

politik negara lain. 7) Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik, dan kelembagaan dalam negara (Limbong, 2011: 217-218). Dari penjelasan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab kemiskinan adalah kegagalan dalam mencukupi kebutuhan dasar seperti (sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan), gagal dalam kepemilikan aset, dan perbedaan kualitas sumber daya manusia (Pandu, 2018: 24). Menurut Moehar (2002: 17), kemiskinan adalah salah satu dari banyaknya masalah yang sulit untuk didefinisikan dan dijelaskan.

Secara umum kemiskinan dapat diukur dalam dua dimensi yaitu, dimensi income, kekayaan, dan dimensi non-faktor keuangan. Kemiskinan dalam dimensi income atau kekayaan tidak hanya diukur dari rendahnya pendapatan yang diterima karena pendapatan rendah biasanya bersifat sementara, selain itu, juga diukur melalui kepemilikan harta kekayaan seperti lahan bagi petani kecil, dan melalui akses jasa pelayanan publik. Sedangkan dari dimensi non keuangan ditandai dengan di mana adanya keputusasaan dan ketidakberdayaan yang dapat menimpa berbagai rumah tangga berpenghasilan rendah (Pandu, 2018: 22). Sehubungan dengan kondisi kemiskinan dan tidak semakin meluas, maka pemerintah pusat atau daerah harus merumuskan serangkai kebijakan penanggulangan kemiskinan, dan meletakkan kemiskinan menjadi salah satu persoalan mendasar dalam hal pembangunan serta menjadi pusat perhatian untuk ditanggulangi.

Menurut M. Gandhi dalam Todaro dan Stephen (2009, 2011: 15), beliau mengungkapkan bahwa realisasi potensi manusia merupakan konsep atau tujuan yang diangkat dari pertimbangan nilai subjektif “tentang apa yang baik, tentang apa yang diinginkan, dan tentang apa yang tidak diinginkan”. Misalnya keadilan ekonomi, sosial, penanggulangan kemiskinan, dan pemenuhan masyarakat lainnya. Pendekatan ini dianggap cukup mapan dalam menanggulangi kemiskinan, salah satunya dengan menciptakan aktivitas perekonomian di daerah dan juga di pedesaan. Ditandai dengan kemampuan daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi serta memanfaatkan dari pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menyebar ke seluruh unsur dalam masyarakat.

3. Pengangguran

Mudrajat (2004: 63) dalam Saiful (2017: 23), pengertian pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai bekerja. Asfia (2013:197) dalam Saiful (2017: 23), pengangguran atau Tuna Karya adalah istilah untuk orang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, dan seseorang yang berusaha mencari kerja yang layak. Tetapi berdasarkan teori kependudukan yang dimaksud dengan teori pengangguran adalah seseorang yang dalam usianya berada dalam usia angkatan kerja dan

sedang mencari pekerjaan. Yarlina dalam Saiful (2017: 24), pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja atau ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum mendapat pekerjaan tersebut. Selain itu, ketiadaan pendapatan menyebabkan pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan tingkat kesejahteraan. Kondisi pengangguran yang berkepanjangan dapat menyebabkan mental yang buruk terhadap pengangguran dan keluarganya.

Di satu sisi, tingkat pengangguran yang tinggi juga dapat menimbulkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial, sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akhirnya jangka panjang dari persoalan pengangguran ini adalah menurunnya Pendapatan Nasional Bruto (PNB) dan pendapatan perkapita suatu negara. Dalam Saiful (2017: 24), berikut adalah beberapa jenis pengangguran ditinjau dari interpretasi ekonomi, antara lain yaitu: a. Pengangguran fiksional (Frictional Unemployment), merupakan pengangguran yang disebabkan adanya keinginan pekerja untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Pengangguran ini juga merupakan pengangguran normal dan tidak dianggap sebagai masalah yang serius. b. Pengangguran struktural (Structural Unemployment) adalah pengangguran yang disebabkan adanya perubahan atau perkembangan teknologi dalam aktivitas kegiatan ekonomi. Sehingga terdapat ketaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan yang dibutuhkan lapangan kerja. c. Pengangguran siklikal

(Cyclical Unemployment) adalah pengangguran yang disebabkan adanya fluktuasi atau siklus dalam perkembangan siklus bisnis atau dikarenakan oleh kemerosotan perekonomian suatu Negara. Kemerosotan ekonomi bisa berasal dari dalam negara dan bisa juga dari luar negara, seperti; konsumsi, investasi, dan ekspor. d. Pengangguran musiman (Seasonal Unemployment), adalah pengangguran yang dipengaruhi oleh perubahan musim, bersifat sementara, dan terjadi dalam jangka pendek secara berulang-ulang. Contohnya sektor pertanian, di luar musim tanaman atau musim panen akan terjadi pengangguran (Asfia, 2013: 197).

Saiful (2017: 24), pengangguran umumnya disebabkan oleh beberapa faktor dari hasil pembangunan, salah satunya adalah dari jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Di samping itu, juga bukan berarti ketiadaan atau kurangnya ketersediaan lapangan kerja menjadikan masalah utama bagi pengangguran. Namun, adanya lapangan kerja disertai juga adanya (skill) yang layak untuk mengisi pekerjaan tersebut sangatlah berpengaruh dalam hal pengangguran ini, dengan begitu diperkirakan kedepannya adanya titik temu antara pencari kerja dengan pencari tenaga kerja. Tidak hanya menyediakan lapangan kerja sesuai dengan kemampuan di bidang masing-masing (skill) yang untuk mengisi tempat yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Namun, juga perlu adanya sebuah motivasi untuk bekerja pula, karena tidak menutup kemungkinan dari sebagian banyak pengangguran bukan hanya masalah lapangan kerja yang diperlukan. Akan tetapi, sifat malas yang harus dilawan oleh setiap

orang seperti frustrasi, acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar, waktu sehari-hari dihabiskan tanpa bekerja, dan tanpa ada motivasi dalam dirinya sendiri. Jadi, tipe orang yang seperti ini sulit untuk bekerja, dan orang-orang yang demikian perlu diberikan sebuah motivasi atau dorongan, sehingga diharapkan timbul niat untuk mau bekerja (Sudrajat, 2000: 7).

Yarlina dalam Saiful (2017: 26), pengangguran merupakan masalah yang begitu nyata dan dekat dengan lingkungan. Masalah pengangguran dapat menimbulkan masalah baru di bidang ekonomi maupun non-ekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rendahnya pendapatan masyarakat yang selanjutnya menyebabkan kemiskinan. Berdasarkan dalam hal tersebut, bahwa kemiskinan merupakan suatu faktor penentu yang mempengaruhi permasalahan seperti keterbelakangan, kebodohan, ketelantaran, kriminalitas, kekerasan, perdagangan manusia, buta huruf, putus sekolah, anak jalanan, dan pekerja anak. Dengan demikian kemiskinan tidak hanya dilihat dari satu sisi rendahnya pendapatan, tetapi harus dari banyak aspek yang saling terkait sehingga bersifat multidimensi.

4. Gepeng

Saiful (2017: 30), gepeng adalah singkatan kata dari istilah gelandangan dan pengemis, kedua tersebut merupakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Menurut Departemen Sosial RI, gelandangan merupakan seseorang atau sekelompok yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak di dalam

masyarakat setempat, seperti tidak mempunyai tempat tinggal, berkerja tidak tetap di suatu wilayah tertentu, dan hidup di tempat umum. Sedangkan Pengemis adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan dari hasil meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Menurut Iqbali (2005), gelandangan termasuk golongan yang mempunyai kedudukan lebih terhormat dari pada pengemis. Selain itu, gelandangan biasanya memiliki pekerjaan tetapi tidak memiliki tempat tinggal yang tetap (berpindah-pindah). Sedangkan pengemis hanya mengharapkan belas kasihan dari orang lain dan mereka golongan yang mempunyai tempat tinggal yang tetap.

Dalam Saiful (2017: 32), ada beberapa faktor kemiskinan yang mempengaruhi timbulnya seseorang menjadi gepeng, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Faktor natural adalah hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi miskin karena memang berasal dari keluarga yang miskin. 2. Faktor kultural merupakan faktor yang disebabkan dari dalam, seperti budaya, lingkungan, dan mental dia sendiri yang menyebabkan seseorang terbelit dalam kemiskinan. 3. Faktor struktural adalah hal-hal yang membuat seseorang menjadi miskin karena kebijakan yang diberlakukan membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Adapun beberapa hal yang menjadi faktor kultural dari adanya pengemis adalah sebagai berikut: a) Cacat fisik Cacat fisik adalah salah satu kendala seseorang mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Di

samping itu, cacat fisik juga bisa menyebabkan seseorang menjadi pengemis, karena seseorang harus mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kelangsungan hidupnya. Selain itu, bisa saja orang tersebut memiliki keahlian yang dapat dikerjakannya di rumah. Namun, karena penyaluran produknya kurang sehingga penghasilan yang didapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup yang meningkat, akhirnya mau tidak mau seseorang akan menjadi pengemis demi mendapatkan penghasilan yang mungkin lebih baik. b) Malas atau merasa nyaman dengan pekerjaannya Sikap ini biasanya dikarenakan orang tersebut tidak ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, cara berpikirnya juga relatif jangka pendek, selalu memikirkan hari ini dan tidak memikirkan hari selanjutnya. Dalam hal ini, bisa jadi berawal dari mental atau putus asa karena mungkin selalu ditolak dalam upaya mencari kerja sehingga mencoba mengemis agar tetap mendapatkan penghasilan.

Selain itu, melihat bahwa pekerjaan mengemis adalah pekerjaan yang paling murah, tidak memerlukan modal yang banyak dan menghasilkan pendapatan lumayan. Hal ini yang menyebabkan seseorang ini akan nyaman dengan pekerjaan dan malas untuk memikirkan pekerjaan yang lainnya. c) Tidak memiliki keterampilan khusus Menurut Saptono Iqbal (2005), maraknya urbanisasi yang dilakukan masyarakat pedesaan yang ingin mengadu nasib dengan datang ke kota yang dianggap memiliki sistem perekonomian yang tinggi dan lapangan kerja yang lebih variasi ketimbang di desa. Namun, urbanisasi ini ternyata dilakukan dengan asal dan tidak memikirkan tujuan yang pasti dengan bekal yang

pasti. Banyak orang yang melakukan urbanisasi, tetapi tidak dibarengi dengan keterampilan khusus untuk bersaing di kota. Maka dengan kurangnya keterampilan mereka malah tidak memperoleh pekerjaan dan kebutuhan di kota yang tinggi memaksa mereka melakukan apapun termasuk meminta-minta belas kasih orang lain.

Dalam Saiful (2017: 32), adapun beberapa kelompok pengemis menurut faktor penyebab di atas, sehingga mereka memutuskan untuk menjadi pengemis, yaitu: 1) Pengemis berpengalaman karena adat Bagi pengemis yang lahir karena adat tindakan mengemis adalah sebuah tindakan kebiasaan. Mereka sulit menjauhkan kebiasaan tersebut karena arahnya lebih pada masa lalu. 2) Pengemis kontemporer kontinyu tertutup Bagi kelompok pengemis yang hidup tanpa pilihan pekerjaan lain tindakan mengemis menjadi satu-satunya pilihan yang harus diambil. Mereka secara terus-menerus mengemis, tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk dapat hidup dengan bekerja yang akan menjamin hidupnya dan mendapatkan uang. 3) Pengemis kontemporer kontinyu terbuka Mereka masih memiliki pilihan pekerjaan lain karena memiliki keterampilan lain yang dapat mereka kembangkan untuk menjamin hidupnya. Akan tetapi keterampilan tersebut tidak berkembang, karena tidak menggunakan peluang sebaik-baiknya, kurangnya motivasi, serta kurangnya potensi sumber daya untuk dapat mengembangkan peluang tersebut.

5. Teori Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi merupakan sebuah kedudukan individu atau kelompok, dan dalam hal tersebut ditentukan oleh latar belakang pendidikan dan pendapatan. Pendekatan ini merupakan pendekatan status sosial atau kondisi ekonomi seseorang yang banyak dikembangkan secara luas dikalangan sosiologi maupun psikologi. Menurut Mubyarto (2003), kondisi ekonomi adalah salah satu usaha yang diarahkan pada lingkungan masyarakat. Hal tersebut untuk memperbaiki tingkat kehidupan yang lebih baik ke depan dengan tidak mengabaikan dasar angkatan sebelumnya. Selain itu, sosial ekonomi diartikan sebagai keadaan ekonomi seseorang dalam bermasyarakat, di mana tingkat sosial ekonomi seseorang dengan orang mempunyai perbedaan (tinggi, menengah, rendah), hal tersebut dinilai dari pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Afrizal (2013: 13).

6. Pertukaran Sosial

Pertukaran sosial merupakan suatu interaksi antara individu dengan individu yang lain, dalam hal tindakan sosial yang saling berkaitan menukarkan objek-objek yang mengandung nilai. Afrizal (2013), teori pertukaran sosial berujuk pada teori (George C. Homans) yang berasumsi bahwa seseorang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman serta dilandasi oleh prinsip transaksi ekonomis. Di mana seseorang menyediakan barang ataupun jasa dan untuk imbalanya adalah memperoleh barang atau jasa tersebut sesuai yang diinginkan. Selain itu, pertukaran sosial tidak semata-

mata diukur dengan uang saja tetapi lebih dari pada itu. Misalnya, seseorang dalam suatu organisasi/perusahaan, selain mengharapkan ganjaran yang berupa gaji juga mendapatkan ganjaran kesenangan, kepuasan kerja, persahabatan, dan mempertinggi harga diri. Homans, menyatakan bahwa proses pertukaran dengan lima proporsional yang saling berhubungan yaitu; proposisi sukses, stimulus, nilai, deprivasi satiasi, dan restu agresi.

Dalam hal proposi tersebut banyak perilaku sosial yang dapat dijelaskan, sebagai berikut: (1) Proposisi Sukses Dalam setiap tindakan, semakin sering tindakan menghasilkan ganjaran melakukan, maka ia akan melakukannya secara terus menerus. (2) Proposisi Stimulasi Jika di masa lalu ada terjadi stimulasi khusus atau seperangkat rangsangan (stimuli) yang merupakan peristiwa di mana tindakan seseorang memperoleh ganjaran, maka semakin mirip stimuli yang ada sekarang ini dengan yang lalu, akan semakin sering seseorang tersebut melakukan tindakan yang serupa. (3) Proposisi Nilai Semakin tinggi nilai sebuah tindakan, maka semakin senang seseorang melakukan tindakan tersebut. (4) Proposisi Deprivasi Satiasi Semakin sering di masa yang baru berlalu seseorang menerima ganjaran tertentu, maka semakin kurang bernilai bagi orang tersebut peningkatan setiap unit ganjaran itu. (5) Proposisi Restu Agresi Bila suatu tindakan seseorang mendapatkan ganjaran yang tidak diharapkan atau menerima hukuman yang tidak diinginkannya, maka orang akan marah. Seseorang cenderung berperilaku agresif dan perilaku

tersebut bernilai baginya. Namun, bila sesuatu tindakan terjadi sebaliknya maka seseorang tersebut akan merasa senang.

Berdasarkan penjelasan di atas, memberikan gambaran tentang ganjaran (intrinsik dan ekstrinsik) dalam pertukaran sosial masyarakat. Dalam hal ini juga terlihat seperti permasalahan gepeng, di mana seseorang gepeng sehari-harinya melakukan tindakan aktivitas memintaminta dengan berharap dibalas kasih (ganjaran) uang maupun barang dari seseorang yang mereka jumpai. Selain itu, orang tersebut secara tidak sengaja maupun sengaja juga mengharapkan ganjaran yang berupa harga diri atau rasa hormat, dan pahala dari Maha Kuasa karena telah berbagi (sedekah).

7. Teori Peran

Teori peran (role theory), & (Sari et al., n.d.) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.

Soraya (2017:11), & (Destiani et al., 2023) peran suatu lembaga berkaitan dengan pelaksana tugas, dan fungsi, seperti dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dituntaskan seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau

manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak, tugas dan tanggungjawab yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya masing-masing. Fungsi sebuah lembaga atau institusi disusun berdasarkan pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Peran diartikan sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang, peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peran dalam hal ini merupakan seikat peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep perihal yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

Soraya (2017: 11), peran juga merupakan suatu kedudukan hukum yang meliputi tugas, fungsi, dan kewenangan aparaturnya yang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Peran dalam hal ini terbagi menjadi:

- a. Peran Normatif adalah peran yang dilakukan oleh suatu lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran Ideal adalah peran yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga dengan didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

- c. Peran Faktual adalah peran yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga yang berdasarkan pada kenyataan di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Soraya (2017: 11), peran suatu lembaga berkaitan dengan pelaksana tugas, dan fungsi, seperti dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dituntaskan seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak, tugas dan tanggungjawab yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya masing-masing. Fungsi sebuah lembaga atau institusi disusun berdasarkan pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.

Menurut Prajudi (2001), Soraya (2017), secara organisasional fungsi merupakan kemampuan yang berdasarkan pada hukum publik, seperti wewenang, hak dan kewajiban. Selain itu, agar wewenang tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, maka dibedakan sebagai berikut:

- a. Pemberian wewenang adalah pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat).
- b. Pelaksanaan wewenang adalah menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan.

- c. Akibat hukum dari pelaksanaan wewenang merupakan seluruh hak atau kewajiban yang terletak rakyat/burger, kelompok rakyat dan badan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di dalam lembaga, organisasi maupun komunitas di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, tugas dan fungsi berkaitan erat dengan hukum publik, kemampuan untuk melaksanakan suatu tindakan hak dan tanggungjawab, atau secara wewenang merupakan kemampuan tindakan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum.

8. Teori Kebijakan

Dalam Ramdhani (2017) menurut Iskandar (2012), kebijakan merupakan serangkaian atau kumpulan rencana program yang meliputi, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau aktoraktor, sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Menerapkan kebijakan sebuah langkah penting bagi organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuannya. Dalam Ramdhani (2017) menurut Thoha (2012), dalam aspek kebijakan terbagi dua, adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan adalah praktika sosial, kebijakan bukan (event) yang asing dan tunggal. Namun, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan dengan berdasarkan pertimbangan dan

melihat sesuatu permasalahan atau kejadian yang terjadi di masyarakat.

- b. Kebijakan adalah suatu langkah atas permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan. Secara keseluruhan kebijakan adalah sebuah usaha atau upaya untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu yang terjadi di masyarakat. Biasanya kebijakan bersifat umum dan dasar, karena mengikuti pedoman atau landasan sasaran untuk mencapai suatu masalah dan usaha-usaha mencapai tujuan yang telah diterapkan, baik itu permasalahan perorangan, kelompok ataupun aspek luas. Dalam Ramdhani (2017) menurut Wahyudi (2016), bahwa proses kebijakan adalah proses yang meliputi, input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu-isu atau kegiatan kebijakan pemerintah. Selain itu, proses kebijakan berwujud penyusunan atau perumusan kebijakan serta pelaksanaan kebijakan tersebut. Di samping itu, isu dan perumusan kebijakan dapat dipahami melalui proses politik yang dilaksanakan elite politik dan atau lembaga lembaga penekan. Sedangkan output merupakan hasil dari proses kebijakan seperti kinerja atau pelaksanaan kebijakan tersebut, kebijakan tidak bersifat permanen. Menurut Godin & Moran (2006) kebijakan hanya dibuat atau disusun sekali dalam rentang waktu tertentu untuk sebuah penyelesaian atas permasalahan yang timbul.

1) Implementasi Kebijakan

Menurut Samudra dalam Ferdinand (2018: 18), implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau (outcomes) bagi masyarakat. Di samping itu, tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Perumusan kebijakan di satu sisi mempunyai proses yang memiliki logika (bottom-up) seperti, proses kebijakan diawali melihat atau mendengar aspirasi dari masyarakat, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain adalah memiliki logika (top-down) di dalamnya seperti, penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro. Lebih dalam, implementasi merupakan sebuah proses untuk mencapai atau mewujudkan penyusunan kebijakan menjadi sebuah tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan.

Selain itu, proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku lembaga atau pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut hal-hal pada kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam hal tersebut, secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari pihak-pihak yang terlibat. Di samping

itu, kesalahan atau ketidaksesuaian kebijakan biasanya dapat dinilai setelah sebuah kebijakan tersebut dilaksanakan dan keberhasilan dari pelaksanaan dari sebuah kebijakan dapat di analisis setelah dilakukan seperti dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Umumnya penilaian atas sebuah kebijakan dapat mencakup dari pelaksanaan kebijakan, isi kebijakan, dan dampak dari kebijakan tersebut stakeholders (Ferdinand 2018: 18).

Keberhasilan dari sebuah kebijakan dapat di analisis. Islamy (2010), menyatakan bahwa sebuah kebijakan akan efektif apabila pelaksanaan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan tindakan atau perbuatan masyarakat harus sesuai dengan keinginan kebijakan pemerintah. Menurut Pulzl & Treib (2007), pemerintah perlu meninjau ulang pelaksanaan kebijakan agar efektif. Misalnya, dari rancangan program yang memadai sampai strukturasi dari proses pelaksanaannya (Ramdhani (2017: 4).

Menurut Edwards III dalam Wahyudi (2016), pelaksanaan kebijakan dapat disimpulkan dari tahapan proses penyusunan kebijakan dan tahapan perumusan kebijakan serta mencakup konsekuensi-konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh sebuah kebijakan tersebut. Edwards III, menyatakan bahwa aspek-aspek yang berhubungan kuat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan adalah komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut mempengaruhi terhadap

pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, serta masing-masing aspek saling berhubungan dengan aspek lainnya (Ramdhani, 2017: 5).

- 2) Dampak Hosio (2007: 57), dampak merupakan suatu perubahan yang nyata pada sikap atau perilaku yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah, maka akibat dampak memperlihatkan hasil dari kebijakan yang dirumuskan oleh sesuatu lembaga atau politis. Sedangkan menurut Irfan (2001: 115), bahwa dampak dari sebuah kebijakan merupakan akibat dan konsekuensi yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak merupakan suatu perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang disebabkan oleh suatu kebijakan pemerintah, memperlihatkan dampak positif dan negatif yang dihasilkan oleh pelaksanaan kebijakan tersebut. Baik secara langsung maupun tidak langsung akan terlihat perubahan-perubahan sosial di lingkungannya masyarakat. Lebih dalamnya, bahwa permasalahan gepeng atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlihat di jalanan merupakan sebagai kritik terhadap elemen pemerintah, yang terselubung atau perlu dilihat dengan kesamaan dari hasil kebijakan pemerintah.

9. Teori Pembinaan

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk

mewujudkan tujuan tersebut apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Menurut pendapat Santoso S. (1995:52) yang mengungkapkan beberapa cara dilakukan dalam Pembinaan adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pemberian bimbingan
- c. Memberikan pengarahannya
- d. Memberikan pendidikan dan pelatihan

10. Penanganan Gepeng di Ibukota Kabupaten Pinrang

Sebagaimana yang sudah diketahui peraturan merupakan sebuah kebijakan yang disusun oleh lembaga pemerintah atau elite politik. Penyusunan peraturan tersebut mulai dari melihat sebuah permasalahan atau fenomena yang tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat atau terdapat sebuah masalah pada lingkungan tersebut dengan maksud untuk menyelesaikan atau menuntaskan masalah. Melihat permasalahan gepeng adalah sebuah masalah sosial dalam lingkungan masyarakat yang tidak sesuai dengan kehidupan yang baik. Namun, dibalik itu gepeng merupakan sebuah fenomena dari kebiasaan yang dipengaruhi oleh sebab-sebab dasar seperti ketidakmampuan atau kekurangan (kemiskinan, pendidikan rendah, dan mental).

Gepeng secara sadar atau tidak sadar mereka telah melakukan sebuah yang tidak baik dalam berkehidupan bernegara, tetapi mereka

bukan kriminal, bukan pula sebuah masalah besar, dan mereka bukan pula tidak menghayati diri mereka. Namun, mereka adalah orang-orang yang kurang perhatian dari kebijakan pemerintah sendiri, yang terasing dari hak kepemilikan, perbedaan antara si kaya dan si miskin. Mereka hadir di muka umum dengan mengharap iba atau balas kasih dari orang lain bukan mereka rendah, bukan pula mereka tidak punya malu, tetapi mereka terpaksa dari keputusan berjuang. Bila di lihat dengan kasat mata hati yang dalam, mereka hadir dengan menampakkan bahwa mereka ada dan mereka kurang kepedulian dari orang yang mereka sayangi, terutama keluarga, kerabat, bahkan masyarakat sekelilingnya. Mereka hadir terkadang mengkritik kebijakan pemerintahan pusat/daerah. Secara tidak sadar bisa dirasakan bahwa mereka kurang tersentuh perhatian dari kebijakan pertumbuhan ekonomi yang tujuan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam negara.

a. Dinas sosial

(Sudiarti & Nasution, 2022) Dinas sosial merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Dinas Sosial memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(M. Ramadhani, Sarbaini, 2016) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan kesejahteraan

sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan sosial dan pembinaan tenaga kerja. Pelaksanaan tugas-tugas, Dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial. Pekerja sosial adalah Petugas Khusus dari Departemen Sosial yang mempunyai keterampilan khusus dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas melaksanakan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada lingkungan Departemen Sosial dan Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Instansi lainnya (pasal 1 Keputusan Menteri Sosial No. 4 tahun 1988).

(Salsabila et al., 2022) Dinas sosial sebagai badan yang bertanggung jawab pada proses penanggulangan yang berada pada daerahnya masing masing. Salah satu fungsi dari keberadaan dinas sosial adalah mencakup kegiatan mensejahterakan masyarakat, dengan upaya yang dapat dilakukan atau bahkan sudah dilakukan oleh pihak dinas sosial yaitu sosialisasi larangan memberikan uang kepada pengemis melalui himbauan lewat tulisan yang dipajang, selain itu dinas sosial dapat berkolaborasi dengan pihak yang berkaitan dalam melakukan Razia terhadap pengemis dan berkolaborasi dengan pihak yang berkaitan dalam melakukan Razia terhadap pengemis dan selanjutnya memulangkan mereka ke tempat asalnya. Karena peran dinas sosial dalam penanggulangan pengemis dan gelandangan adalah sebuah tugas pokok struktur organisasi yang berkaitan dengan

masalah sosial baik gelandangan, pengemis, dan masalah sosial lainnya.

Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup, baik perorangan, keluarga, kelompok, dan komunitas masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta nilai sosial budaya yang tercermin dalam wujud: a. Meningkat dan berkembangnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. b. Semakin meningkatnya prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial c. Semakin melembaganya usaha kesejahteraan sosial yang mampu menjangkau sasaran program yang lebih luas.

Dinas sosial adalah bagian kantor pemerintahan daerah dibidang sosial dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah yang mempunyai fungsi pengelolaan rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial, pengembangan sosial serta partisipasi sosial masyarakat.

Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, memiliki program sebagai berikut : pencegahan, usaha pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat untuk mencegah perkembangannya dan meluasnya jumlah penyebaran dan

kompleksitas permasalahan penyebab anak jalanan, usaha penanggulangan merupakan usaha untuk meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan yang ditunjukkan baik

b. Teori Gelandangan dan Pengemis

(Sudiarti & Nasution, 2022) Gelandangan dan pengemis atau sering disingkat Gepeng. Mereka pemandangan umum di hampir semua kota di Indonesia. Ada banyak orang yang nasibnya kurang beruntung, sehingga terpaksa menggantungkan hidup di jalanan. Sebagian memilih menjadi pengasong, penyemir sepatu, pemulung dan pengamen. Sedangkan sebagiannya lagi menempuh jalan lebih pintas dalam mengais rezeki menjadi Pengemis. Penertiban Gepeng membutuhkan waktu untuk penanganannya, karena kadang diwaktu tertentu populasi Pengemis meningkat seperti yang terjadi dihari libur, hari raya keagamaan, maupun di pusat-pusat rekreasi dan perbelanjaan, tentunya secara grafik digambarkan jumlah populasi Pengemis naik turun. Penyebab kesenjangan yang besar adalah faktor ekonomi yang tidak merata sehingga jurang sosial antara si kaya dan si miskin tinggi terutama di kota-kota besar.

Gelandangan juga dapat didefinisikan sebagai individu yang kehilangan ikatan dengan rumah tangga atau tempat tinggal yang tetap, seringkali terpinggirkan dari sumber daya ekonomi dan sosial. Menurut Wright dan Rubin (2015), gelandangan dapat mengalami

keterpinggiran struktural yang mengakibatkan ketidakstabilan perumahan dan kesejahteraan

Menurut (Sari et al., n.d.) Pengemis merupakan sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara meminta. Berbagai macam pakaian atau perlengkapan mereka gunakan, seperti pakaian lusuh, topi, gelas plastik, bungkus permen, atau kotak kecil untuk menempatkan uang yang mereka dapatkan dari meminta – minta. Mereka menjadikan pengemis sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai macam alasan, seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka karena lapangan pekerjaan yang sempit.

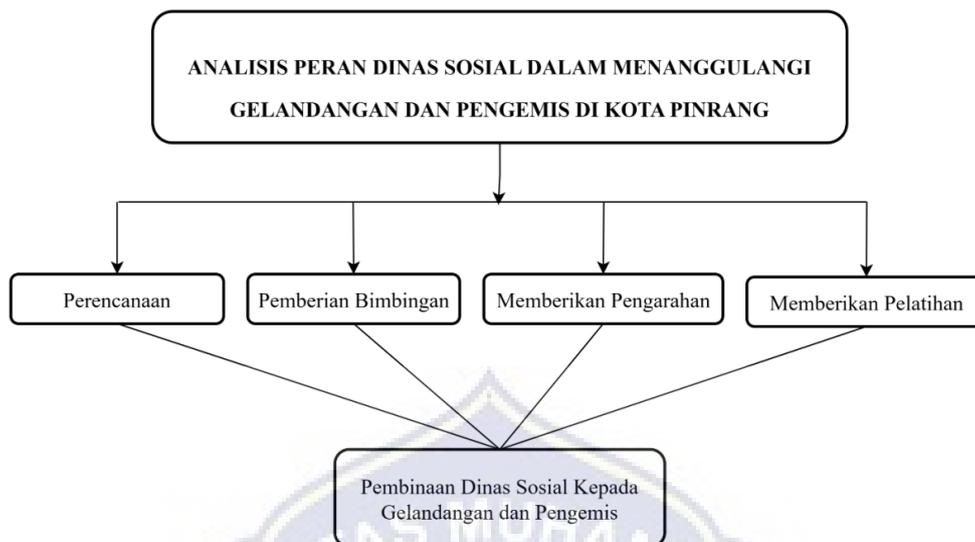
(Indriyani et al., 2022) Homeless atau gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

C. Kerangka Berpikir

Gepeng atau Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau kelompok yang hidup tidak sesuai dengan norma di dalam lingkungan bermasyarakat hidup yang layak, melakukan aktivitas di tempat umum atau jalanan, dan juga mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta kepada orang lain. Peristiwa atau fenomena ini bukan sebuah kejadian yang asing lagi bagi masyarakat, bahkan sudah menjadi bagian dari

kehidupan masyarakat di Ibukota Kabupaten Pinrang. Gepeng sering terlihat di tempat keramaian seperti, persimpangan jalan, pusat pembelanjaan, tempat wisata, hiburan, dan warkop di Ibukota Kabupaten Pinrang.. Pemerintah Ibukota Kabupaten Pinrang sudah mengeluarkan peraturan atas permasalahan tersebut, yang sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial sebagai lembaga sosial. Melalui pembiayaan yang dijelaskan dalam bab 5 Pasal 20, permasalahan ini merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh pihak Dinas Sosial yang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota dan sebagai tindak lanjut dalam penyelesaian permasalahan ini.

Dari gambaran ini sangat membutuhkan kebijakan yang pasti atau penanganan serius agar tidak mengganggu ketertiban umum, tidak berdampak buruk terhadap Perekonomian Ibukota Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan teori model Pembinaan yang ditemukan oleh santoso (1995) yang mengungkapkan beberapa cara dilakukan dalam Pembinaan adalah perencanaan, pemberian bimbingan, mmemberikan pengarahan, dan memberikan pependidikan dan pelatihan. Guna mempermudah maksud penelitian ini, maka peneliti menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar. 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan gambar kerangka di atas dapat dijelaskan alur penelitian ini, di mana peran yang dilihat dalam penelitian ini adalah pembinaan apa saja yang diambil oleh Dinas Sosial dalam menangani masalah pengemis dan gelandangan di Ibukota Kabupaten Pinrang serta sudah sejauh mana tingkat efektifnya. Jika Pembinaan tersebut belum efektif maka apa solusi yang harus dilakukan sehingga masalah gepeng dapat teratasi di Ibukota Kabupaten Pinrang.

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah menganalisis peran Dinas Sosial dalam menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis di Ibukota Kabupaten Pinrang. Penelitian ini dapat mencakup evaluasi program, dampak kebijakan, serta hambatan yang dihadapi dalam upaya menyelesaikan permasalahan gelandangan dan pengemis di Ibukota Kabupaten Pinrang.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Perencanaan adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan terarah dengan tujuan meningkatkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan subjek atau peserta pembinaan melalui tindakan bimbingan, arahan, serta pelatihan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam konteks ini, perencanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang memiliki peran penting dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana strategis yang efektif. Rencana ini bertujuan untuk menangani permasalahan sosial yang kompleks, seperti gelandangan dan pengemis, dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Melalui perencanaan yang matang, Dinas Sosial berupaya untuk tidak hanya memberikan solusi sementara, tetapi juga memberdayakan individu-individu tersebut agar mereka mampu mandiri dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat secara bermartabat.
2. Pemberian bimbingan merupakan usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang untuk mengajak, mengiringi, menuntun, memotivasi, serta mendorong gelandangan dan pengemis yang dibina agar

dapat mencapai kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik. Dalam hal ini, akan diteliti bagaimana peran Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang dalam memberikan bimbingan yang berguna, sehingga dapat memberikan bekal kepada para gelandangan dan pengemis agar mereka tidak kembali turun ke jalanan dan mengganggu masyarakat. Penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas program bimbingan dalam membantu mereka menemukan alternatif kehidupan yang lebih positif dan produktif, seperti mendapatkan pekerjaan atau keterampilan baru yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, penelitian ini juga akan menilai sejauh mana bimbingan tersebut berhasil dalam mendukung integrasi gelandangan dan pengemis ke dalam masyarakat dengan bermartabat, sehingga tercipta lingkungan yang lebih harmonis dan aman bagi semua warga.

3. Memberikan pengarahan dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang untuk memastikan bahwa semua upaya yang diarahkan sesuai dengan tujuan pembinaan gelandangan dan pengemis. Pengarahan ini bertujuan untuk mengupayakan agar gelandangan dan pengemis dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi mereka. Dalam hal ini, penting untuk mengevaluasi seberapa efektif Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang dalam memberikan pengarahan kepada gelandangan dan pengemis, sehingga mereka tidak lagi turun ke jalanan dan mengganggu masyarakat. Melalui pengarahan yang tepat dan berkesinambungan, diharapkan gelandangan dan pengemis dapat

mengubah pola hidup mereka, menemukan peluang baru, dan berintegrasi kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

4. Memberikan pendidikan dan pelatihan dalam penelitian ini adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada gelandangan dan pengemis dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan keahlian mereka. Dalam hal ini, peneliti akan menilai bagaimana Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang melaksanakan pelatihan kepada para gelandangan dan pengemis, sehingga mereka memperoleh keterampilan yang dapat dikembangkan dan digunakan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka. Penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas program pelatihan dalam membantu para gepeng meningkatkan taraf hidup mereka, menemukan peluang kerja yang layak, dan mengintegrasikan kembali ke masyarakat dengan lebih bermartabat dan produktif. Selain itu, penelitian juga akan melihat dampak jangka panjang dari pelatihan tersebut terhadap peningkatan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi para gelandangan dan pengemis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dan lokasi dalam penelitian ini yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan selama 2 bulan, mulai dari tanggal 5 Maret sampai dengan 5 Mei 2024.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pinrang. Adapun alasan penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana peran dinas sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Ibukota Kabupaten Pinrang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Adapun jenis dan tipe dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini cenderung menggunakan analisis.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan tipe penelitian deskripsi kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu cara memahami semua permasalahan yang sedang terjadi dengan data dan menggunakan metode wawancara,

pengamatan langsung dan dokumentasi. Adapun tujuan penelitian deskriptif kualitatif ini ialah guna membuat uraian akurat mengenai fakta-fakta lapangan.

C. Informan Penelitian

Adapun teknik dalam penentuan informan dalam penelitian ini yakni, pengambilan informan secara purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan informan yang memiliki pengetahuan yang luas dan dapat menjelaskan sebenarnya tentang objek penelitian yang akan diteliti. Penelitian memerlukan informasi yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan :

1. Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pinrang
2. Satpol PP
3. Masyarakat
4. Anak Jalanan

D. Sumber Data

Sumber data dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dari hasil wawancara langsung, kuesioner terhadap responden dan hasil survei. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dihasilkan dari sumber lain yang telah ada.

1. Data Primer

Merupakan data yang didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan atau observasi langsung di lapangan dan

pencatatan dokumen atau data yang berhubungan dengan penelitian. (Kepala dinas, Pegawai serta masyarakat).

2. Data Sekunder

Merupakan data yang di dapatkan melalui penelitian terdahulu dari Undang-Undang, buku, jurnal ataupun informasi lainnya yang dapat mendukung data primer dan berhubungan dengan judul penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi (pengamatan)

Informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

2. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung (tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal) kepada semua informan yang ada. Teknik wawancara yang digunakan adalah

teknik wawancara terstruktur dengan menyiapkan bentuk-bentuk pertanyaan yang sama antara informan satu dengan yang lainnya.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa dokumen adalah catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi. Studi dokumen merupakan komponen tambahan yang melengkapi metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Ini dapat dilakukan melalui pencarian dokumen di perpustakaan dari buku-buku dan catatan-catatan yang sering disebut sebagai riset pustaka.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013) penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. Hal-hal yang dilakukan dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data, dalam tahapan ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian dalam penyederhanaan, abstraksi, dan perubahan data kasar yang sudah diperoleh.
2. Penyajian data, peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun dalam penarikan kesimpulan dan pengambilan sebuah tindakan. Display data atau penyajian data yang sering digunakan pada langkah ini yakni bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan, peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan pemeriksaan ulang dengan mencari makna yang diperolehnya

dari lapangan, mencatat keteraturan dan wujud yang mungkin ada dan menjadi sebuah alur dari fenomena, dan sebuah tawaran.

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti peneliti sesuai (relevan) dengan data yang sesungguhnya ada dan memang benar-benar terjadi. Untuk memperoleh tingkat keabsahan data peneliti tentunya diperlukan untuk mendukung sebuah penelitian kualitatif yakni melalui :

1. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara memeriksa atau mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber terkait dengan objek penelitian.
2. Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara memeriksa data melalui sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Data yang diterima dari wawancara kemudian dicek melalui observasi dan dokumentasi.
3. Triangulasi waktu, dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data tetapi dalam kondisi waktu yang berbeda, pengujian kredibilitas data dapat dilaksanakan dengan melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lainnya dengan waktu atau situasi yang berbeda agar dapat memberikan data yang valid dan lebih meyakinkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Profil Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Pinrang terletak sekitar 185 km di utara ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini mencakup koordinat antara 3°19'13" hingga 4°10'30" lintang selatan dan 119°26'30" hingga 119°47'20" bujur timur. Batas wilayahnya adalah sebelah utara dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah barat dengan Kabupaten Polmas di Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, serta sebelah selatan dengan Kota Parepare. Luas wilayah Kabupaten Pinrang adalah sekitar 1.961,77 km².

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase
1	Suppa	74,20	3,78
2	Mattiro Sompe	96,99	4,94
3	Lanrisang	73,01	3,72
4	Mattiro Bulu	132,49	6,75
5	Watang Sawitto	58,97	3,01
6	Paleteang	37,29	1,90
7	Tiroang	77,73	3,96
8	Patampanua	136,85	6,98

9	Cempa	90,30	4,60
10	Duampanua	291,86	14,88
11	Batulappa	158,99	8,10
12	Lembang	733,09	37,37
Pinrang		1961,77	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Pinrang

Dari segi administratif, Kabupaten Pinrang dibagi menjadi 12 kecamatan, 40 kelurahan, dan 69 desa.

1. Kecamatan Batu Lappa (4 Desa, 1 Kelurahan)
2. Kecamatan Cempa (6 Desa, 1 Kelurahan)
3. Kecamatan Duampanua (10 Desa, 5 Kelurahan)
4. Kecamatan Lanrisang (6 Desa, 1 Kelurahan)
5. Kecamatan Lembang (14 Desa, 2 Kelurahan)
6. Kecamatan Mattiro Bulu (7 Desa, 2 Kelurahan)
7. Kecamatan Matirro Sompe (7 Desa, 2 Kelurahan)
8. Kecamatan Paleteang (6 Kelurahan)
9. Kecamatan Patampanua (7 Desa, 4 Kelurahan)
10. Kecamatan Suppa (8 Desa, 2 Kelurahan)
11. Kecamatan Tiroang (6 Kelurahan)
12. Kecamatan Watang Sawitto (8 Kelurahan)

Kabupaten Pinrang mempunyai garis pantai sepanjang 93 km, memungkinkan pengembangan areal pertambakan di sepanjang pantai tersebut. Selain itu, dataran rendah hingga perbukitan dan pegunungan juga mendominasi wilayah ini, memberikan kesempatan yang baik untuk pertanian

dengan beragam komoditas seperti tanaman pangan, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Pinrang sebagai daerah potensial untuk sektor pertanian. Secara spesifik, ketinggian wilayah Kabupaten Pinrang bervariasi, dengan 60,41% berada pada ketinggian 0–500 mdpl, 19,69% berada pada ketinggian 500–1000 mdpl, dan 9,90% berada pada ketinggian di atas 1000 mdpl.

2. Profil Dinas Sosial Kabupaten Pinrang

Dinas Sosial dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pinrang yang merupakan penjabaran dari PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Dinas Sosial Kabupaten Pinrang adalah sebagai salah satu jajaran unit kerja eselon II di lingkungan pemerintah daerah kabupaten pinrang.

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Pinrang nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang. Maka Dinas Sosial Kabupaten Pinrang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, yang menjadi tanggungjawabnya dan kewenangan lain yang diserahkan oleh Bupati. Untuk melaksanakan Tugas Pokok di maksud diatas, Dinas Sosial Kabupaten Pinrang melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Merumuskan Kebijakan Teknis dan Mengkoordinasikan serta mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Pinrang

Sebagai penjabaran atau penerapan dengan mempertimbangkan Visi, Misi fungsi dan tugas pokok yang dimiliki Dinas Sosial menetapkan tujuan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung sistem birokrasi yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan;
- 2) Meningkatkan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan dalam berperan pada pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat;
- 3) Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat secara merata;
- 4) Meningkatkan Perlindungan Masyarakat dari Bencana alam dan Sosial.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Pinrang adalah :

- 1) Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
- 3) Meningkatnya taraf kehidupan ekonomi masyarakat secara merata;
- 4) Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari ancaman bencana

3. Kependudukan Kabupaten Pinrang

1) Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah individu dalam populasi dari tahun ke tahun, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti kelahiran dan kematian. Perubahan ini terjadi secara berkelanjutan dan memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan.

Tabel 4.2 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pinrang 2010-2022

Tahun	Jumlah Penduduk
2010	351.118
2011	354.652
2012	360.019
2013	361.293
2014	364.087
2015	366.789
2016	369.595
2017	372.230
2018	374.583
2019	377.119
2020	403.994
2021	407.371
2022	411.795

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Pinrang

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya kabupaten pinrang terus mengalami pertumbuhan jumlah penduduk mulai dari 2010 dengan jumlah penduduk 351.118 jiwa dan terakhir data dipublikasikan tahun 2022 sebanyak 411.795 jiwa.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Kecamatan

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)
Suppa	34.965	8,49
Mattiro Sompe	30.461	7,40
Lanrisang	20.092	4,88
Mattiro Bulu	32.255	7,83
Watang Sawitto	57.227	13,90
Paleteang	43.528	10,57
Tiroang	23.744	5,77
Patampanua	38.559	9,36
Cempa	19.866	4,82
Duampanua	51.139	12,42
Batulappa	11.532	2,80
Lembang	48.427	11,76
Kabupaten Pinrang	411.795	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Pinrang

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kecamatan Watang Sawitto memiliki jumlah penduduk terbanyak yang persentasenya mencapai 13,90% dari jumlah keseluruhan penduduk. Sedangkan untuk kecamatan yang memiliki penduduk terendah yaitu Batulappa yang hanya memiliki 11.532 jiwa penduduk dan hanya 2,80% dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Pinrang.

Tabel 4.4 Laju pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang

Kecamatan	Laju Pertumbuhan (2021-2022)	Kepadatan Penduduk Per Km²
Suppa	0,89	471
Mattiro Sompe	0,63	314
Lanrisang	1,08	275
Mattiro Bulu	1,28	243
Watang Sawitto	0,70	970
Paleteang	1,17	1167
Tiroang	1,84	305
Patampanua	1,42	282
Cempa	0,95	220
Duampanua	1,03	175
Batulappa	1,23	73
Lembang	1,71	66
Kabupaten Pinrang	0,83	210

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Pinrang

Kepadatan penduduk di Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 sekitar 210 jiwa/Km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Paleteang yaitu sekitar 1.167 jiwa/Km². Sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Lembang yaitu sekitar 66 jiwa/Km².

2) Kondisi Kemiskinan dan Kesejahteraan

Pada bulan Maret 2023, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pinrang mencapai 8,90 persen, mengalami kenaikan sekitar 0,11 persen poin dari Maret 2022 dan 0,09 persen poin dari Maret 2021. Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pinrang pada bulan Maret 2023 mencapai 34,23 ribu orang. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 0,59 ribu orang atau 590 orang dibandingkan dengan Maret 2022, dan sekitar 0,72 ribu orang atau 720 orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2021.

Secara keseluruhan, selama periode Maret 2019 hingga Maret 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pinrang mengalami fluktuasi, baik dari segi jumlah penduduk maupun persentase. Tingkat kemiskinan mencapai puncaknya pada Maret 2023 dan terendah pada Maret 2019. Kenaikan persentase kemiskinan tertinggi terjadi antara Maret 2019 dan Maret 2020, sebesar 0,40 persen poin. Salah satu faktor penyebabnya mungkin adalah dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja dan penurunan ekonomi. Meskipun demikian, ekonomi Pinrang perlahan-lahan membaik. Peningkatan persentase dan jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebagian besar disebabkan oleh kenaikan harga bahan makanan dan non-makanan. Kenaikan harga tersebut pada Maret 2023 dibandingkan dengan Maret 2022 mencapai 5,89 persen (mengacu pada inflasi Kota Pare-Pare). Kenaikan harga bahan makanan dan non-makanan ini tentu akan berdampak pada tingkat konsumsi penduduk Kabupaten Pinrang.

Tabel 4.5 Kemiskinan Kabupaten Pinrang Maret 2019-Maret 2023

Periode	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Perubahan (%)	Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	Indeks keparahan kemiskinan (P2)
Maret 2019	294.349	-	1,54	0,40
Maret 2020	338.731	15,08	1,27	0,34
Maret 2021	345.892	2,11	1,77	0,50
Maret 2022	366.808	6,05	1,06	0,20
Maret 2023	400.091	9,07	1,22	0,28

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2019-Maret 2023

Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Garis Kemiskinan pada Maret 2023 adalah sebesar Rp 400.091,- per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 9,07 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2021, terjadi kenaikan sebesar 15,67 persen.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pinrang pada periode Maret 2019–Maret 2023 mengalami fluktuasi. Pada Maret 2019 indeks P1 sebesar 1,54, mengalami penurunan menjadi 1,27 pada Maret 2020. Pada Maret 2021 indeks P1 meningkat menjadi 1,77, kemudian mengalami penurunan pada periode Maret 2022 menjadi 1,06, dan pada

Maret 2023 mengalami kenaikan menjadi 1,22. Pergerakan angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pinrang ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Pinrang selama lima tahun cenderung bergerak dinamis di sekitar garis kemiskinan.

Banyaknya kemiskinan mencerminkan bahwa kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya merata, selain itu, menimbulkan ada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Pinrang. Berikut merupakan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Ibukota Kabupaten Pinrang.

Tabel 4.6 Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Ibukota Kabupaten Pinrang

Tahun	Perempuan	Laki-Laki
2020	11	6
2021	10	10
2022	10	21
2023	20	13
Jumlah	51	50

Sumber : Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang

Tabel 4.6 memperlihatkan jumlah gelandangan dan pengemis di Ibukota Kabupaten Pinrang dimana jumlah gelandangan dan pengemis dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 hanya selisih satu antara

gepeng perempuan dan laki-laki. Jumlah tertinggi gepeng perempuan ada pada tahun 2023 sedangkan untuk laki-laki ada pada tahun 2022.

B. Hasil Penelitian

1. Kondisi Gelandangan dan Pengemis di Ibukota Kabupaten Pinrang

Gelandangan dan pengemis sering disebutkan dengan kata gepeng, dan gepeng merupakan turunan dari istilah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Istilah ini tidak hanya menjadi bagian dari percakapan sehari-hari dan topik pemberitaan media massa, tetapi juga telah diadopsi sebagai istilah resmi dalam kebijakan pemerintah, merujuk pada sekelompok orang tertentu yang sering ditemui di jalanan.

Penyebab timbulnya gepeng sangat bervariasi dan kompleks. Salah satu faktor utama adalah kehilangan pekerjaan yang stabil dan layak, yang bisa disebabkan oleh kurangnya keterampilan, penurunan ekonomi, atau ketidakstabilan politik. Selain itu, kehilangan tempat tinggal juga menjadi pemicu umum, baik karena pengusuran, konflik keluarga, atau masalah finansial. Masalah kesehatan mental seperti depresi, gangguan jiwa, atau kecanduan juga dapat membuat seseorang sulit mempertahankan pekerjaan atau hubungan sosial yang stabil. Faktor lainnya termasuk kebijakan pemerintah yang tidak memadai dalam hal perumahan, pelayanan kesehatan mental, atau bantuan sosial. Selain dari faktor-faktor yang telah disebutkan, kemunculan gepeng juga dapat disebabkan oleh karena seseorang memilih gaya hidup meminta-minta karena merasa nyaman dengan keadaan tersebut atau kurangnya motivasi untuk berusaha lebih baik.

Aktivitas para gelandangan dan pengemis terus meningkat di area publik, dan kehadiran mereka di Kabupaten Pinrang semakin terlihat dengan peningkatan jumlahnya yang terus bertambah. Pertambahan jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa masih ada ketidaksejahteraan yang belum terselesaikan di kalangan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para gepeng, alasan mereka mau jadi gepeng di Kabupaten Pinrang yaitu karena kemiskinan, pengangguran, dan usia. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Randi (22 tahun) pengamen asal kecamatan Batulappa, sebagai berikut:

“Saya asli orang Batulappa, Saya sudah putus sekolah dari tamat SD tidak melanjutkan ke SMP karena faktor biaya. Saya begini supaya tidak membebani keluarga jika ada kebutuhan. Pernah saya cari pekerjaan tapi susah karena tidak punya keterampilan. Dan saya akhirnya terbawa ke lingkungan seperti ini. Saya biasanya mulai mengamen sore sampai tengah malam. Biasanya uang yang terkumpul mulai dari Rp 30.000 – Rp 100.000 per hari. Jika sudah dapat uang yang cukup saya berkumpul dengan teman-teman yang lain.”

Adapun pernyataan yang sama juga disampaikan oleh S (59 Tahun) pemulung dan pengemis asal Watang Sawitto, sebagai berikut:

“Saya asli orang Sawitto, saya begini karena hidup sebatang kara, tidak ada keluarga. Saya memulung dan juga meminta-minta hanya untuk kebutuhan makan sehari-hari. Saya hanya keluar dari pagi hingga sore, waktu maghrib saya pulang. Penghasilan per hari jika keluar bisa dapat hanya sekitar Rp 50.000”.

Pernyataan yang sama juga diterangkan oleh J (52 Tahun), pemulung dan pengemis asal Watang Sawitto, sebagai berikut :

“Saya asli orang Watang Sawitto, Saya begini karena tidak tahu lagi harus cari uang dengan cara apa. Umur sudah tua istri juga sudah meninggal dan anak saya jauh ke perantauan tidak pernah ada kabar. Saya biasanya mulung botol-botol dan kertas karton dan terkadang ada orang yang iba dan memberi uang atau sembako.. Saya begini hanya untuk bertahan hidup sehari-hari, jika tidak begini saya tidak makan.

Saya biasanya keluar dari pagi jam 10 sampai malam setelah isya saya pulang. Saya dapat uang sehari-hari paling banyak Rp 70.000”.

Pernyataan yang lain juga disampaikan oleh A (17 Tahun) dan R (16 Tahun) manusia silver asal Watang Sawitto, sebagai berikut:

“kami asli orang sawitto. Kami jadi manusia silver setelah pulang dari sekolah, kami melakukan ini untuk membantu orang tua dirumah agar tetap terpenuhi kebutuhan sehari-harinya. Biasanya kami ke jalanan mulai dari sore hari sampai dengan tengah malam. Paling banyak dalam sehari kami dapat sekitar 150.000 untuk berdua. ”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa gepeng di Ibukota Kabupaten Pinrang bahwa keadaan para gepeng memang memprihatinkan. Tetapi jika terus dibiarkan maka akan mengganggu masyarakat sekitar. Pendapatan dari menjadi gepeng juga lumayan banyak. Berikut perhitungan penghasilan gepeng per hari dan per bulan.

Tabel 4.7 Perhitungan Penghasilan Gepeng

No	Pendapatan/Hari
1	Rp 30.000 – Rp 50.000
2	Rp 55.000 – Rp 70.000
3	Rp 75.000 - Rp 100.000
4	Rp 105.000 – Rp 120.000
5	Rp 125.000 – Rp 150.000

Sumber : Data Primer 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perkiraan pendapatan gepeng per bulan hampir sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan atau bahkan melebihi. Dengan pendapatan yang lumayan banyak seperti itu, makin banyak orang yang berpikir menjadi gepeng, karena dengan

mengandalkan iba orang lain maka kita akan cepat mendapatkan uang. Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya gepeng di Ibukota Kabupaten Pinrang karena adanya rasa puas dengan penghasilan yang didapatkan. Ada baiknya masyarakat berhenti untuk memberi para gepeng uang agar mereka jera dan tidak lagi turun untuk meminta-minta dan mengganggu masyarakat sekitar.

2. Dampak Gelandangan dan Pengemis terhadap Masyarakat Ibukota Kabupaten Pinrang

Orang-orang yang hidup sebagai gelandangan dan pengemis mencari nafkah dengan cara meminta-minta atau mengamen, mengandalkan simpati dari orang lain. Selain itu, mereka sangat terhubung dengan kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Pinrang. Kehadiran gepeng ditengah masyarakat banyak membuat masyarakat terganggu dan membuat masyarakat tidak nyaman untuk berada diluar. Kehadiran gepeng juga mengganggu ketertiban pengendara, karena seringnya para gepeng berkumpul dan bertukar-tukaran untuk mengemis saat lampu merah ke pengendara yang singgah.

Namun fenomena gepeng ini juga disebabkan oleh masyarakat umum juga yang selalu memberi setiap didatangi sehingga orang-orang melihat peluang dan tertarik untuk menjadi gepeng. Berikut wawancara dengan masyarakat, yang dimana merasa terganggu terhadap adanya gepeng ini dan pandangan mereka mengenai fenomena gepeng di Ibukota Kabupaten Pinrang, F (23 tahun), sebagai berikut:

“Saya merasa sangat terganggu, karena biasanya saya sudah menolak tetapi masih memelas dan tidak mau pergi. Saya tidak sering memberikan uang kepada gepeng karena saya merasa mereka masih bisa

apatkan pekerjaan yang layak dari itu, apalagi kalau saya lihat umurnya masih tergoong muda. Kecuali untuk gepeng yang sudah tua atau cacat saya biasa beri kisaran Rp 1000 atau Rp 2000”.

Adapun hasil wawancara yang menyatakan hal yang sama mengenai gepeng oleh M (32 tahun), berikut hasil wawancaranya :

“Saya biasanya terganggu jika yang meminta itu menurut saya masih bisa cari pekerjaan yang lain. Saya juga terkadang emosi jika melihat anak-anak kecil banyak meminta-minta dijalanan, mereka seperti diperalat oleh seorang oknum. Saya biasa sering memberi karena tidak mau ribet diganggu terus menerus. saya juga biasa memberi karena rasa iba, apalagi kalau gepengnya sudah tua atau cacat, saya biasa beri Rp 5000”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa gepeng mengganggu ketertiban umum, karena secara tidak langsung para gepeng memaksa dan tidak mau pergi jika belum diberi uang. Mereka juga melakukan modus agar terlihat dikasihani dan masyarakat simpati sehingga memberikan uang. Masyarakat juga ada yang menyatakan bahwa terkadang banyak anak-anak yang seperti dimanfaatkan oleh oknum tertentu demi mendapatkan uang. Hal ini akan berdampak buruk bagi anak-anak karena mereka akan kebiasaan dan kedepannya akan mengandalkan belas kasihan orang lain saja tanpa mau berusaha.

3. Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Gepeng di Ibukota Kabupaten Pinrang.

Kehadiran pengemis dipengaruhi oleh berbagai faktor yang perlu ditangani oleh pemerintah agar jumlah mereka tidak terus bertambah dalam jangka waktu yang lama. Penanganan masalah pengemis menjadi tanggung jawab yang harus diemban oleh berbagai pihak. Jumlah gepeng yang masih banyak menunjukkan bahwa penanganan mereka belum optimal dilakukan. Oleh

karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelesaikan masalah gepeng ini demi terciptanya kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Penanganan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial bertujuan untuk mencegah penyebaran mereka di sekitar masyarakat dan membantu mereka kembali menjadi bagian dari masyarakat dengan memberikan pelatihan dan pengembangan diri agar bisa mencapai taraf hidup yang layak.

Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kabupaten Pinrang dalam menangani gelandangan dan pengemis yaitu sebagai berikut :

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal dari setiap kegiatan untuk menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta penetapan tahapan-tahapan yang dibutuhkan. Upaya penanganan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dengan melakukan perencanaan oleh Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang. Perencanaan dinas sosial Ibukota Kabupaten Pinrang dalam penanganan gelandangan dan pengemis melibatkan beberapa langkah strategis yang bertujuan untuk memberikan penanganan kepada para gepeng agar tidak mengganggu masyarakat umum. Program utama yang direncanakan oleh Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang yaitu :

1. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi data dan penyandang tuna sosial (gelandangan dan pengemis)
2. Melaksanakan kegiatan penertiban, pencegahan, serta bekerjasama dengan pihak instansi terkait dalam pencegahan, pengarahan,

konsultasi teknis bagi penyandang tuna sosial (gelandangan dan pengemis).

Lebih lanjut, upaya perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Ibukota kabupaten Pinrang didasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pinrang, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri, dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah”. Bupati Pinrang, I. H., dalam RPJMD 2021 menyatakan,

Saya berharap Musrenbang RPJMD ini dapat membuat tim-tim yang tergabung dalam tim penyusun lebih selektif terhadap program prioritas, sehingga dihasilkan dokumen perencanaan yang akurat, profesional, dan akuntabel. Langkah awal yang akan ditempuh untuk merealisasikan tujuan program kami adalah melakukan pendataan terhadap para gelandangan dan pengemis agar kami mengetahui informasi tentang mereka dan dapat menindaklanjutinya lebih jauh agar mereka juga bisa menjadi bagian dari masyarakat yang normal sesuai dengan visi dan misi kami."



Sumber: <https://images.app.goo.gl/mP2EnVf7nRgqsZYa7>

Langkah awal yang dilakukan oleh Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang sebagai bentuk perencanaan untuk mewujudkan visi misi masyarakat Ibukota Kabupaten Pinrang yang sejahtera, religious, harmonis, mandiri, dan tangguh adalah dengan melakukan pendataan terhadap PGOT (pengemis, gelandangan, dan orang terlantar).



Sumber : <https://images.app.goo.gl/wEs9QFZqXHRSR7Tax7>

Dari gambar tersebut dapat dilihat dokumentasi Dinas Sosial yang melakukan pendataan terhadap masyarakat gelandangan dan pengemis sebagai upaya mewujudkan masyarakat Ibukota Kabupaten Pinrang yang:

1. Sejahtera

Kondisi Masyarakat Kabupaten Pinrang yang terpenuhi kebutuhan hidupnya dengan cukup, yang ditandai dengan jumlah penduduk miskin yang rendah, pendapatan masyarakat yang tinggi, derajat pendidikan yang tinggi, derajat kesehatan yang tinggi, dan akses pelayanan publik yang mudah.

1. Religius

Kondisi masyarakat Kabupaten Pinrang dengan kehidupan kerohanian berkembang, yang ditandai dengan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertakwa, serta memmanifestasikan moralitas dalam kehidupan sehari-hari.

2. Harmonis

Kondisi masyarakat yang hidup tentram, dengan terpeliharanya ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan hidup masyarakat berlandaskan kebersamaan dan toleransi.

3. Mandiri

Kondisi masyarakat yang memiliki prakarsa dalam mewujudkan keberdayaan, yang ditandai dengan kuatnya keswadayaan, semangat gotong royong, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan ekologi (Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, 2021).

Berdasarkan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, dapat dilihat bahwa perencanaan yang dibuat bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan membawa perubahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konsep dan peraturan, Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang melalui perencanaan yang termuat dalam RPJMD 2019-2024 berupaya untuk mewujudkan masyarakat Pinrang yang sejahtera, religius, harmonis, mandiri, dan tangguh dengan melakukan pendataan terhadap pengemis dan gelandangan. Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui informasi pribadi pengemis dan gelandangan tersebut agar nantinya dapat diberikan tindak lanjut.

2) Memberikan Pengarahan

Memberikan arahan merupakan tindakan untuk memandu dan membimbing individu atau kelompok agar mencapai tujuan sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh pemberi arahan, seperti Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang yang memberikan arahan kepada gelandangan

dan pengemis dalam rangka program pembinaan. Arahan yang diberikan berupa nasihat untuk membimbing mereka agar dapat hidup mandiri dan beradaptasi dengan lingkungan sosial di sekitar mereka, sehingga mereka dapat menyatu dan mengoptimalkan potensi diri mereka untuk masa depan yang lebih baik.

Memberikan pengarahan kepada gelandangan dan pengemis setelah dilakukan pendataan oleh Dinas Sosial bertujuan agar mereka tidak lagi turun ke jalanan dan mengganggu kesejahteraan masyarakat umum. Pengarahan ini adalah langkah dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi. Dalam konteks ini, pengarahan bukan hanya merupakan proses penyampaian informasi, tetapi juga kesempatan untuk membangun hubungan yang empatik dan memberikan bimbingan yang berkelanjutan.

Salah seorang masyarakat yang berinisial S, menyatakan peran penting Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis mengatakan:

“Koordinasi dengan Dinas Sosial sangat berperan penting dalam menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis agar penanganannya bisa berjalan dengan maksimal. Dinas Sosial akan memberikan pengarahan dan jaminan sosial berupa rehabilitasi bagi gelandangan dan pengemis. Dengan demikian, mereka diharapkan bisa segera sadar untuk hidup dalam kondisi sosial dan ekonomi yang layak dan tidak lagi menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lainnya.”



Sumber : <https://dinsos.pinrangkab.go.id/?p=823>

Terkai penanganan lebih lanjut masalah gepeng, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, M. S., menjelaskan:

“Anak jalanan, gelandangan, atau pengemis yang telah terjaring oleh Dinas Sosial akan diberikan langkah persuasif dengan menelusuri keberadaan keluarga mereka dan mengembalikan mereka kepada keluarganya untuk dibina lebih lanjut. Setelah mereka semua sadar, kami akan mengantar mereka kepada keluarganya untuk diberi dukungan secara fisik dan mental agar mereka bisa hidup layaknya orang normal”.

Dari hasil observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang antara lain dilakukan saat adanya razia, dengan mengumpulkan gelandangan dan pengemis lalu di berikan pengarahan dan saat pembinaan di Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang.

Tabel 4.8 Data Gepeng yang diberikan pengarahan di Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang

Tahun	Perempuan	Laki-Laki
2020	11	6
2021	10	10

2022	10	21
2023	20	13
Jumlah	51	50

Sumber : Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang

Tetapi dapat diketahui bahwa masih banyak gelandangan dan pengemis binaan Dinas Sosial yang telah di berikan pembinaan, bimbingan dan pengarahan masih kembali menjadi gelandangan dan pengemis.

Hasil wawancara penulis dengan gepeng mengenai pengarahan yang mereka terima dari peran Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, R (22 tahun) pengamen jalanan sebagai berikut:

Saya adalah seorang pengamen yang pernah didata oleh Dinas Sosial. Kemudian, saya diberikan pengarahan oleh Dinas Sosial untuk tidak mengemis dan mengganggu masyarakat di jalanan. Setelah pengarahan tersebut, kami dilepaskan dan dikembalikan ke keluarga. Pengarahan itu membuat saya sadar untuk tidak mengemis lagi dan mencari pekerjaan yang lebih baik."

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah aktif dalam memberikan pengarahan kepada gelandangan dan pengemis. Upaya ini dilakukan dengan tujuan mencegah mereka kembali turun ke jalanan. Pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang lebih bersifat persuasif, yakni mengajak gelandangan dan pengemis untuk lebih sadar bahwa hidup di jalan dan mengemis adalah tindakan yang tidak dibolehkan secara hukum, melanggar norma-norma sosial, serta membahayakan keselamatan

mereka karena kondisi di jalan tidaklah sehat untuk kehidupan sehari-hari.

Namun, meskipun berhasil pada beberapa orang, pengarahan tersebut tidak sepenuhnya mampu menyadarkan semua gelandangan dan pengemis binaan Dinas Sosial untuk tidak mengemis lagi. Hal ini tentu harus menjadi perhatian Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang untuk meningkatkan efektivitas pengarahan dengan metode, materi, dan narasumber yang lebih tepat, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran pada gelandangan dan pengemis untuk hidup normal seperti masyarakat pada umumnya. Ini sesuai dengan visi dan misi pemerintah Ibukota Kabupaten Pinrang yang menginginkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, religius, mandiri, dan tangguh.

3) Pemberian Bimbingan

Penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kabupaten Pinrang bertujuan agar para pengemis tidak meluas dalam kehidupan masyarakat dan dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif. Upaya ini dilakukan dengan memberikan pengembangan diri untuk mengembalikan kemampuan mereka, sehingga mereka dapat mencapai taraf hidup dan penghidupan yang lebih baik dan layak (Nur, 2022).

Pemberian bimbingan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Ibukota Kabupaten Pinrang Ibukota Kabupaten Pinrang khususnya Dinas Sosial, untuk mengajak dan mendorong gelandangan dan pengemis menuju kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik.

Bimbingan ini dilakukan secara persuasif agar gelandangan dan pengemis tidak merasa dipaksa dalam pembentukan karakter dan perilaku mereka. Bimbingan ini berguna untuk mengajak mereka mengubah pola pikir ke arah yang lebih maju serta mengubah karakter, cara pandang, dan cara hidup ke depannya.

Pemberian bimbingan oleh Dinas Sosial terhadap gelandangan dan pengemis merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Bimbingan ini diharapkan dapat membuat para gepeng tidak lagi mengganggu kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah hasil wawancara dengan S. M., selaku pekerja sosial ahli muda, terkait bimbingan yang dilakukan terhadap gepeng:

“Kami sudah berusaha memberikan bimbingan kepada para gepeng di Dinas Sosial. Namun, pemberian bimbingan belum terjalankan dengan optimal karena adanya kendala fasilitas. Kendala utamanya adalah tidak adanya rumah singgah. Setelah dilakukan pengarahan, kami tidak tahu di mana akan melakukan bimbingan kepada gelandangan dan pengemis ini. Biaya untuk membangun rumah singgah juga cukup besar, karena membutuhkan anggaran dan operasional. Jika ada rumah singgah, kami bisa memberikan bimbingan dan pengajaran kepada anak-anak supaya mereka memiliki keterampilan sehingga mereka tidak lagi memilih untuk menjadi pengemis atau gelandangan.”

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa bimbingan dalam rangka program pembinaan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang belum mencapai hasil yang diharapkan. Walaupun Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang telah melakukan bimbingan sebagaimana mestinya, hasilnya belum tercapai.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang menghadapi hambatan karena kurangnya fasilitas yang memadai. Ketiadaan rumah singgah membuat proses bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terbatas hanya pada ruang kantor mereka. Akibatnya, bimbingan yang dapat diberikan menjadi terbatas dan kurang optimal karena keterbatasan ruang dan sumber daya.

Untuk menyikapi hambatan tersebut, pihak Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang juga melibatkan pihak Kementerian Agama untuk memberikan bimbingan keagamaan kepada para gelandangan dan pengemis sebelum mereka diberikan pengarahan dan jaminan sosial, serta dikembalikan kepada pihak keluarga masing-masing.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh M. S., selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, yang menyatakan:

“Kami bersama Dinas Sosial akan terus mengintensifkan keberadaan para gelandangan dan pengemis yang berada di jalanan untuk senantiasa dibimbing agar dapat sadar untuk tidak lagi hidup dan bekerja di jalanan. Bersamaan dengan proses razia, kami juga melakukan pembimbingan secara langsung kepada pengemis yang berada di jalanan. Kami berupaya semaksimal mungkin agar para gelandangan dan pengemis ini bisa kembali kepada keluarganya untuk dibina lebih lanjut sehingga tidak mengganggu kenyamanan ataupun ketertiban masyarakat Ibukota Kabupaten Pinrang.”

Proses pembimbingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial bersama dengan Kementerian Agama dimaksudkan agar para gepeng bisa segera sadar dan menggali potensi dirinya untuk melakukan kegiatan yang lebih positif demi meningkatkan taraf hidupnya dan tidak dipandang dengan stigma buruk oleh masyarakat. Walaupun proses pembimbingan ini tidak

dilakukan secara rutin dan bersifat mendesak karena dilakukan bersamaan dengan razia, proses ini setidaknya bisa menjadi upaya untuk membuat para gepeng kembali berkumpul bersama keluarganya.

Lebih lanjut, Sidiq menyatakan bahwa tujuan keterlibatan Kementerian Agama dalam memberikan pembinaan berupa pemahaman kerohanian dan pengembangan karakter adalah untuk mengintensifkan keberadaan gelandangan dan pengemis, menciptakan kenyamanan dan ketertiban masyarakat Ibukota Kabupaten Pinrang, demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, religius, harmonis, dan mandiri untuk kehidupan yang lebih baik sebagaimana harapan pemerintah Ibukota Kabupaten Pinrang

4) Pemberian Pelatihan

Mengenai peran Dinas Sosial dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan berikut:

1. Melakukan pendataan/penyuluhan sosial oleh dinas sosial
2. Melakukan pengarahan bagi para gepeng
3. Melakukan pembinaan dan pelatihan dengan melibatkan Kementerian Agama
4. Penguatan keluarga, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan dan pendidikan

Proses pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan pendataan, pengarahan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para gelandangan dan pengemis.

Pembinaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis (Nur, 2022).

Pendataan kepada para gelandangan dan pengemis dilakukan dalam rangka menjalankan arahan oleh Dinas Sosial dengan merujuk pada Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019. Bentuk pembinaan yang dilakukan adalah dengan memberikan larangan. Penegasan diberikan kepada para gepeng bahwa terdapat peraturan yang menjelaskan larangan dan sanksi bagi pengemis yang masih melakukan hal yang sama, seperti mengemis di jalanan, dan sebagainya.

Dinas Sosial memberikan bekal berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan agar gelandangan dan pengemis tidak lagi kembali ke jalanan. Namun, penerapan Perda No. 7 Tahun 2019 untuk melarang gelandangan dan pengemis kembali ke jalanan sebagai upaya pembinaan ternyata kurang efektif di Ibukota Kabupaten Pinrang. Hal ini dibuktikan dengan wawancara salah satu pengemis berinisial A (17 tahun), seorang pengemis yang berbandan sebagai manusia silver, yang menyatakan:

“Saya pernah ditangkap sekali dengan teman saya. Saya lalu dibawa ke Dinas Sosial. Di sana kami diberitahukan untuk tidak mengganggu masyarakat yang sedang berkendara. Setelah diberikan pengarahan, kami dikembalikan ke keluarga tanpa adanya pelatihan keterampilan. Besoknya kami tetap jadi begini karena tidak ada juga solusi dari Dinas Sosial, demi mencari nafkah kami tetap turun jadi manusia silver di jalanan.”

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan gepeng yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pinrang belum efektif. Tidak adanya solusi atau pemberian bekal pelatihan

keterampilan kepada para gepeng yang berhasil diamankan membuat mereka tetap tidak berubah. Upaya pembinaan yang tidak memadai menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan belum mampu memberikan dampak yang signifikan dalam mengatasi masalah ini. Akibatnya, masalah gelandangan dan pengemis masih menjadi perhatian utama, dan diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas penanganan mereka serta memberikan solusi yang lebih berkelanjutan.

Adapun upaya yang bisa dilakukan untuk mengefektifkan proses pembinaan bagi para gelandangan dan pengemis adalah dengan melakukan penyuluhan sosial secara langsung melalui:

1. Pembimbingan dan pengarahan yang melibatkan Kementerian Agama untuk memberikan bekal kerohanian.
2. Pemeriksaan kesehatan dengan bekerja sama dengan pihak Dinas Kesehatan.
3. Penguatan karakter oleh Dinas Sosial.

Hal tersebut merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan keberfungsian individu agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam masyarakat. Pemenuhan layanan tersebut dilakukan sebagai wujud pembinaan kepada para gelandangan dan pengemis agar terlindungi hak-haknya sebagai warga negara.

Salah seorang pegawai Dinas Sosial, S. M., mengatakan bahwa berbagai upaya dilakukan untuk mengarahkan kegiatan pelatihan menjadi

kegiatan penyuluhan sosial yang juga bermanfaat bagi para gepeng, sebagaimana dikatakan:

“Walaupun kami keterbatasan terhadap fasilitas ruang untuk melakukan pelatihan secara langsung, tetapi tidak membuat kami berhenti dalam mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis ini. Kami berupaya dan menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama untuk memberi pengarahan serta pembimbingan secara langsung terkait pengembangan potensi diri, dan melakukan pemeriksaan kesehatan bersama dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan kesehatan para gelandangan dan pengemis agar bisa dipulangkan kepada keluarga dan diberi dukungan untuk hidup lebih layak secara sosial dan ekonomi. Upaya kami adalah dengan memberikan mereka sedikit refleksi berupa pelatihan menjahit bagi perempuan agar mereka bisa lebih produktif.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penanganan gepeng oleh Dinas Sosial belum berjalan dengan efektif, khususnya dalam hal pembinaan. Dengan hanya melakukan larangan sesuai Perda No. 7 Tahun 2019, banyak gepeng tidak jera dan tetap kembali ke jalanan. Walaupun begitu, Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang terus berusaha dan berupaya semaksimal mungkin dalam penanganan gepeng di Ibukota Kabupaten Pinrang melalui penyuluhan sosial yang meliputi pembimbingan dan pengarahan yang melibatkan Kementerian Agama untuk memberikan bekal kerohanian, pemeriksaan kesehatan dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dan penguatan karakter oleh Dinas Sosial.

Upaya tersebut masih memerlukan dukungan lebih lanjut. Pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian ekstra dengan menyediakan fasilitas yang memadai, berupa rumah singgah, sehingga Dinas Sosial memiliki tempat yang layak untuk memberikan bimbingan secara efektif. Selain itu, alokasi dana yang memadai dari pemerintah daerah sangat penting untuk membangun

infrastruktur yang sesuai. Dengan adanya fasilitas yang memadai, diharapkan permasalahan gelandangan dan pengemis dapat teratasi secara menyeluruh, dan kenyamanan serta ketertiban masyarakat dapat terjaga dengan baik di Ibukota Kabupaten Pinrang.

C. Pembahasan

Kemiskinan menjadi faktor krusial di balik keberadaan gelandangan dan pengemis. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kurangnya kondisi ekonomi, tetapi juga terkait dengan aspek mental dan keterampilan individu. Kemiskinan bisa mengubah pola pikir seseorang untuk memilih jalur mengemis, seringkali disertai dengan kurangnya pendidikan dan keahlian. Timbulnya gepeng di Kabupaten Pinrang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu; faktor natural merupakan suatu masalah usia yang sudah lanjut yang membuat seseorang tidak mampu memperjuangkan hidupnya. Faktor kultural adalah suatu masalah dari kebiasaan seseorang atau penyakit malas berkerja, sehingga menjadi gepeng akan mudah baginya.

Kenaikan jumlah gelandangan dan pengemis di ibukota Kabupaten Pinrang memiliki konsekuensi yang merugikan bagi masyarakat, yang mungkin mempengaruhi beberapa orang untuk bergabung dalam kelompok tersebut. Hal ini didorong oleh pandangan bahwa menjadi gelandangan dan pengemis bisa menghasilkan uang tanpa perlu modal awal. Dampak negatif lainnya adalah gangguan pada ketertiban umum dan kedamaian lingkungan di Kabupaten Pinrang. Selain itu, aktivitas meminta-minta secara paksa oleh beberapa pengemis dapat merugikan perekonomian masyarakat. Selain itu, banyak gelandangan yang

dimanfaatkan oleh orang tua atau orang lain untuk meminta-minta, terutama yang masih di bawah umur. Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena dalam jangka panjang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental anak-anak tersebut.

Penanganan masalah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pinrang merupakan tugas yang diemban oleh Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, sesuai dengan mandat lembaga sosial dalam menangani berbagai masalah sosial yang timbul. Meskipun Dinas Sosial telah berupaya dalam menjalankan tugasnya, upaya-upaya yang dilakukan belum berhasil menghasilkan dampak yang positif.

Adapun peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis yaitu:

1. Perencanaan

Menurut Listyansih (2014), Perencanaan adalah proses berkelanjutan yang mencakup dua aspek utama, yaitu formulasi dan pelaksanaan. Perencanaan berfungsi untuk mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, karena sifat rencana adalah sebagai panduan dalam menjalankan aktivitas tersebut. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Cangara (2013), Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang mengenai hal-hal yang akan dilakukan di masa depan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan penanganan gelandangan dan pengemis yang telah disusun oleh Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang adalah berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pinrang yang tertuang dalam RPJMD 2019-2024, dengan harapan terwujudnya masyarakat Pinrang yang sejahtera, religius, harmonis, mandiri, dan tangguh dalam mengelola potensi daerah.

Perencanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang memiliki peran penting dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana strategis yang efektif. Rencana ini tidak hanya sekadar merumuskan langkah-langkah untuk menangani permasalahan sosial yang kompleks terkait dengan gelandangan dan pengemis, tetapi juga berfungsi sebagai panduan dalam memastikan upaya-upaya tersebut dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dalam menjalankan perencanaan tersebut, Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang melakukan pendataan terhadap para gelandangan dan pengemis. Pendataan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai jumlah, lokasi, dan kondisi sosial serta ekonomi mereka, sehingga rencana yang disusun dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang sebenarnya. Dengan demikian, pendekatan yang dilakukan dalam menangani masalah tersebut dapat menjadi lebih terarah dan berdampak positif bagi mereka yang membutuhkan bantuan.

Pada proses pendataan, informasi terkait pengemis dan gelandangan akan terungkap, yang kemudian akan diikuti dengan tindak lanjut berupa pemberian perlindungan dan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Tujuan utama dari pendataan ini adalah untuk memastikan bahwa para gelandangan dan pengemis dapat mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan tidak mengalami diskriminasi dari masyarakat. Dengan memahami kondisi mereka secara lebih mendalam melalui pendataan, Dinas Sosial dapat merancang program-program yang lebih tepat sasaran untuk memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui tindakan ini, diharapkan mereka dapat mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan,

pendidikan, tempat tinggal yang layak, serta kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan mencari pekerjaan. Dengan demikian, pendataan menjadi langkah awal yang penting dalam upaya untuk memperbaiki kondisi sosial dan kesejahteraan para gelandangan dan pengemis, serta mendorong inklusi sosial dan penghapusan stigma terhadap mereka dalam masyarakat.

Dalam menjalankan perannya, Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang telah berhasil merumuskan perencanaan yang matang untuk menangani masalah gelandangan dan pengemis. Langkah-langkah yang telah diambil ini tidak hanya mencakup penyusunan rencana strategis, tetapi juga meliputi pendataan yang teliti dan menyeluruh terkait dengan kondisi mereka. Dengan melakukan pendataan ini, Dinas Sosial dapat mengumpulkan informasi yang lebih mendalam tentang latar belakang, kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan individu-individu tersebut. Informasi ini menjadi dasar yang sangat penting dalam merancang program-program bantuan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Selain itu, dengan merumuskan perencanaan yang komprehensif, Dinas Sosial juga dapat menetapkan langkah-langkah yang jelas dan terukur untuk mengevaluasi efektivitas program yang telah dilaksanakan serta membuat penyesuaian jika diperlukan. Dengan demikian, melalui upaya perencanaan yang matang dan berkelanjutan, Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang dapat memberikan bantuan yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi gelandangan dan pengemis di wilayahnya.

2. Memberikan Pengarahan

Menurut Sukarna (2011), Pengarahan merupakan dorongan dan motivasi kepada individu untuk bersungguh-sungguh dan berusaha keras dalam

mencapai tujuan dengan ikhlas, sejalan dengan perencanaan dan upaya pengorganisasian yang dilakukan oleh pihak pelaksana. Sedangkan menurut Kurniadi (2013), Pengarahan merupakan proses memberikan tugas, perintah, dan instruksi yang memungkinkan individu memahami keinginan pelaksana. Melalui pengarahan ini, individu dapat berkontribusi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang telah terlibat secara aktif dalam memberikan pengarahan kepada gelandangan dan pengemis. Pendekatan ini meliputi pemberian nasehat dan bimbingan yang bertujuan untuk membantu mereka mengatasi tantangan dan masalah yang dihadapi. Melalui interaksi ini, Dinas Sosial berupaya untuk memberikan arahan yang relevan serta memberikan panduan yang bermanfaat bagi gelandangan dan pengemis dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka.

Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk mencegah mereka kembali terjun ke jalanan dan membuat mereka sadar untuk mengembangkan potensi diri, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Pengarahan yang dilakukan bersifat persuasif, dengan mencoba mengajak mereka untuk memahami bahwa hidup di jalanan dan mengemis tidak hanya melanggar hukum dan norma sosial, tetapi juga membahayakan keselamatan mereka, mengingat kondisi tidak sehat di jalanan. Meskipun Dinas Sosial telah memberikan pengarahan secara kontinu, ternyata masih banyak dari gelandangan dan pengemis yang kembali ke kehidupan jalanan.

Hal ini menjadi sinyal bahwa pendekatan yang digunakan belum sepenuhnya berhasil. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus dari Dinas

Sosial untuk mengevaluasi metode, materi, dan narasumber yang digunakan dalam pengarahan. Pengembangan pengarahan yang lebih efektif membutuhkan pendekatan yang lebih terarah dan komprehensif. Dinas Sosial dapat mempertimbangkan menggunakan metode yang lebih interaktif dan partisipatif, serta memilih materi yang lebih relevan dan menarik bagi target audiens. Selain itu, penting juga untuk melibatkan narasumber yang memiliki pengalaman langsung atau keahlian khusus dalam bidang ini, sehingga pesan yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan diterima oleh gelandangan dan pengemis. Dengan demikian, diharapkan upaya pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya meninggalkan kehidupan di jalanan dan mencari solusi yang lebih baik untuk masa depan mereka.

Pengembangan pengarahan yang lebih efektif membutuhkan pendekatan yang lebih terarah dan komprehensif. Dinas Sosial dapat mempertimbangkan menggunakan metode yang lebih interaktif dan partisipatif, serta memilih materi yang lebih relevan dan menarik bagi target audiens. Selain itu, penting juga untuk melibatkan narasumber yang memiliki pengalaman langsung atau keahlian khusus dalam bidang ini, sehingga pesan yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan diterima oleh gelandangan dan pengemis. Dengan demikian, diharapkan upaya pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya meninggalkan kehidupan di jalanan dan mencari solusi yang lebih baik untuk masa depan mereka.

3. Pemberian Bimbingan

Menurut Hikmawati (2012), Bimbingan mencakup semua program, kegiatan, dan layanan di lembaga yang bertujuan membantu individu dalam merencanakan, melaksanakan, dan menyesuaikan diri dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari mereka. Dan menurut Mu'awanah dan Hidayah (2012), Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau siswa, atau kelompok siswa, dengan tujuan membantu mereka mengenali diri sendiri, termasuk kemampuan dan kelemahan mereka, sehingga mereka dapat mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas jalan hidupnya. Melalui bimbingan, mereka diharapkan dapat mengatasi kesulitan sendiri dan memahami lingkungan mereka untuk menyesuaikan diri dengan tepat. Akibatnya, diharapkan mereka dapat mencapai kebahagiaan dalam hidup.

Berdasarkan hasil wawancara, bimbingan yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang telah mencakup dua aspek penting, yaitu bimbingan kerohanian dan pengembangan karakter, yang dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Agama. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan bimbingan kepada gelandangan dan pengemis, terdapat tantangan yang menghambat pencapaian hasil yang diharapkan. Meskipun prosedur bimbingan telah diterapkan, hasilnya masih belum memuaskan. Hal ini terutama karena kurangnya fasilitas yang memadai bagi Dinas Sosial, terutama dalam memberikan bimbingan langsung, karena terbatasnya ruang bimbingan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung agar bimbingan dapat dilaksanakan secara lebih

efektif dan efisien, sehingga tujuan dari bimbingan tersebut dapat tercapai dengan lebih baik.

Keterbatasan ruang dan sumber daya telah menjadi hambatan serius dalam memberikan bimbingan yang optimal kepada gelandangan dan pengemis. Dampaknya, program bimbingan yang telah dilaksanakan tidak mencapai hasil yang diharapkan. Untuk mengatasi tantangan ini, Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang telah mengambil langkah strategis dengan berkolaborasi dengan Kementerian Agama untuk memberikan bimbingan kerohanian kepada para gelandangan dan pengemis. Diharapkan, kolaborasi ini dapat meningkatkan keberadaan mereka serta menciptakan kenyamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

Namun, upaya tersebut masih memerlukan dukungan lebih lanjut. Pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian ekstra dengan menyediakan fasilitas yang memadai, seperti rumah singgah, sehingga Dinas Sosial memiliki tempat yang layak untuk memberikan bimbingan secara efektif. Selain itu, alokasi dana yang memadai dari pemerintah daerah sangat penting untuk membangun infrastruktur yang sesuai. Dengan adanya fasilitas yang memadai, diharapkan permasalahan gelandangan dan pengemis dapat teratasi secara menyeluruh, dan kenyamanan serta ketertiban masyarakat dapat terjaga dengan baik di Ibukota Kabupaten Pinrang.

4. Memberikan Pelatihan

Menurut Sofyandi (2013), pelatihan adalah rangkaian program yang disusun untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan seseorang. Efektivitas pelatihan adalah istilah yang digunakan untuk menilai apakah

program tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan menurut Triasmiko (2014), Pelatihan adalah upaya yang direncanakan untuk membantu individu dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam pekerjaan mereka.

Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada para gelandangan dan pengemis mengacu pada Perda No. 7 Tahun 2019 yang mengatur larangan terhadap praktik mengemis serta menetapkan sanksi dan hukuman bagi pelanggar. Meskipun upaya hukum tersebut telah diterapkan, namun kenyataannya, kesadaran para gelandangan dan pengemis untuk meninggalkan kehidupan di jalanan masih belum optimal. Oleh karena itu, pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial memiliki tujuan lebih dari sekadar penegakan hukum, yakni memberikan pemahaman yang mendalam kepada mereka mengenai alternatif kehidupan yang lebih baik.

Upaya yang kemudian dilakukan untuk meningkatkan peran Dinas Sosial adalah dengan memberikan pelatihan langsung kepada para gelandangan dan pengemis, yang terintegrasi dengan berbagai kegiatan lainnya. Ini termasuk kerjasama dengan lembaga lain, seperti pemberian bimbingan dan pengarahan yang melibatkan Kementerian Agama, pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan, dan penguatan karakter. Melalui pendekatan ini, diharapkan terjadi perubahan positif dalam kondisi dan kehidupan para gelandangan dan pengemis di Ibukota Kabupaten Pinrang. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada mereka, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran akan alternatif kehidupan yang lebih baik dan memberikan mereka dukungan dalam mewujudkannya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, terlihat bahwa peran Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Ibukota Kabupaten Pinrang masih belum optimal. Meskipun telah dilakukan pemberian pelatihan kepada mereka, hasil yang diperoleh masih belum memuaskan. Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial seharusnya tidak hanya memberikan arahan agar para gelandangan dan pengemis tidak lagi turun ke jalanan dan mengganggu masyarakat. Sebaliknya, pelatihan harus mencakup aspek-aspek yang lebih mendalam, seperti pembangunan keterampilan, peningkatan kesadaran, dan memberikan pemahaman akan alternatif kehidupan yang lebih baik.

Dalam praktiknya, terlihat bahwa gelandangan dan pengemis masih terus berada di jalanan dan melanjutkan kegiatan meminta-minta kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang belum mampu memberikan efek yang signifikan dalam mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis di Ibukota Kabupaten Pinrang. Dalam konteks ini, perlu peran pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada Dinas Sosial, seperti rumah singgah, agar pemberian pelatihan dapat dilakukan secara optimal. Rumah singgah memberikan lebih dari sekadar tempat perlindungan fisik. Mereka bisa menjadi pusat untuk melanjutkan proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan yang telah dimulai melalui pelatihan. Di rumah singgah, gelandangan dan pengemis dapat diberikan bimbingan yang lebih intensif dan berkelanjutan, serta kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan yang mereka pelajari. Selain itu, rumah singgah juga dapat memberikan lingkungan yang lebih stabil dan aman bagi mereka untuk mengubah pola hidup mereka secara bertahap.

Dengan demikian, harapan dari pemberian pelatihan tidaklah hilang begitu saja. Sebaliknya, diadakannya rumah singgah dapat menjadi pendorong bagi para gelandangan dan pengemis untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari melalui pelatihan, serta memberikan kesempatan nyata untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian ekstra dengan menyediakan fasilitas yang memadai, sehingga Dinas Sosial memiliki tempat yang layak untuk memberikan pelatihan secara efektif. Selain itu, alokasi dana yang memadai dari pemerintah daerah sangat penting untuk membangun infrastruktur yang sesuai. Dengan tersedianya fasilitas rumah singgah yang memadai, diharapkan gelandangan dan pengemis tidak hanya disediakan tempat tinggal, tetapi juga kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai keterampilan, mulai dari keterampilan kerja hingga keterampilan sosial dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, pelatihan juga bisa mencakup pendidikan dasar dan pembelajaran tentang kewirausahaan agar mereka dapat memulai usaha kecil atau mendapatkan pekerjaan yang layak.

Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan gelandangan dan pengemis akan memiliki lebih banyak peluang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Selain itu, pelatihan juga dapat membantu mereka memperoleh rasa percaya diri dan motivasi untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik. Dengan demikian, fasilitas rumah singgah sangat perlu untuk diadakan oleh Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang guna meningkatkan efisiensi pelatihan yang diberikan. Diharapkan

Dinas Sosial dapat memberikan perhatian lebih terhadap pengadaan rumah singgah di Ibukota Kabupaten Pinrang dengan segera mengusulkan pengalokasian dana kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang menjadi gelandangan dan pengemis.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dan hasil pembahasan dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang dalam perannya mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis adalah dengan merancang rencana penanganan gelandangan dan gepeng berdasarkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dalam RPJMD 2019-2024, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera, religius, harmonis, mandiri, dan tangguh. Pengarahan diberikan kepada gelandangan dan gepeng untuk tidak hidup secara mengemis dan menggelandang. Melalui bimbingan sesuai prosedur, mereka didorong untuk meninggalkan gaya hidup tersebut dan mengembangkan pola hidup yang lebih baik. Kerjasama dengan Kementerian Agama diperlukan untuk meningkatkan efektivitas bimbingan. Meskipun pelatihan belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan fasilitas, penyuluhan sosial secara langsung dilakukan dengan melibatkan kolaborasi dengan lembaga lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Pemerintah Ibukota Kabupaten Pinrang perlu memprioritaskan pembangunan fasilitas rumah singgah bagi gelandangan dan pengemis. Rumah singgah ini akan memberikan tempat yang aman dan layak bagi

mereka untuk tinggal sementara, serta memberikan akses kepada layanan sosial, kesehatan, dan pelatihan keterampilan.

2. Penting untuk mengadakan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif dari memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis. Masyarakat perlu diberitahu bahwa memberikan uang secara tidak langsung dapat memperpanjang siklus kemiskinan dan menghambat upaya penanganan yang lebih holistik.
3. Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang perlu diberikan dukungan lebih lanjut dalam hal sumber daya manusia, dana, dan peralatan untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. Pelatihan tambahan untuk petugas Dinas Sosial juga dapat membantu mereka menghadapi tantangan yang kompleks dalam penanganan gelandangan dan pengemis.
4. Pemerintah perlu mengadopsi pendekatan holistik dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis, yang mencakup program rehabilitasi, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, serta dukungan psikososial. Pendekatan ini akan membantu menciptakan solusi yang berkelanjutan dan membantu gelandangan dan pengemis untuk keluar dari lingkaran kemiskinan
5. Pemerintah Ibukota Kabupaten Pinrang perlu melakukan upaya lebih aktif untuk melibatkan pemerintah pusat dalam penanganan masalah gelandangan dan pengemis. Ini dapat dilakukan melalui pengajuan proposal proyek yang jelas dan strategis, serta meminta bantuan teknis dan finansial untuk meningkatkan infrastruktur dan program penanganan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andu, J. C., Nayoan, H., & Monintja, D. K. (2023). Kinerja Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Merehabilitasi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Manado. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 2013–2015.
- Destiani, D. A., Nastia, & Basir, M. A. (2023). *PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENANGGULANGAN ANAK PENGEMIS DI KOTA BAUBAU*. 4(3), 555–564.
- Djaafar, L., Wantu, S., Lukum, R., & Hamid, S. Al. (2022). Peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Menangani Pengemis di Kota Gorontalo. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(4), 1553. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i4.1101>
- Fatmawati, L. S., Yusuf, M., Abdillah, M., & Rahman, R. A. (2021). Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 154–167. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i3.47>
- Hamidah, S. N. (2019). Penanggulangan Gelandangan Pengemis (GePeng) di Kota Serang Banten dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. *Lembaran Masyarakat*, 5(1), 55–76.
- Indriyani, I., Sungkono, S., & Karnama, M. M. (2022). Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kabupaten Karawang. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 10162–10171. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3368>
- M. Ramadhani, Sarbaini, H. M. (2016). Peran Dinas Sosial Dalam

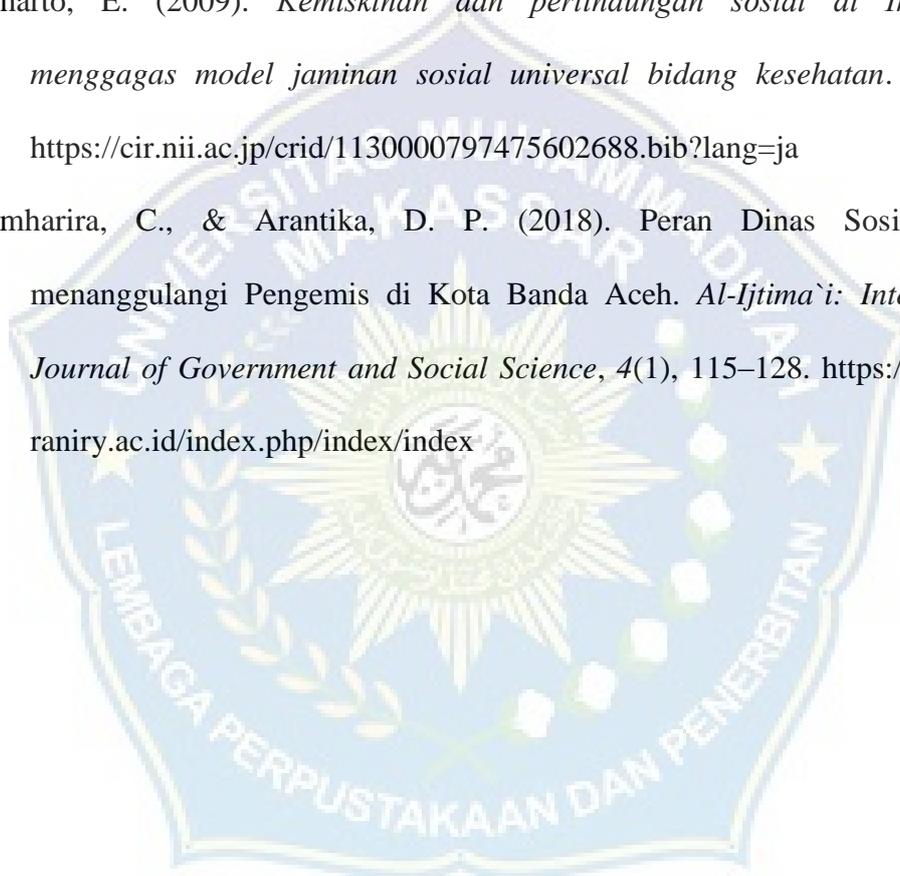
- Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11), 947–954.
<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/download/744/648>
- Nasution, A. (2017). Kebijakan Pembentukan Modal Sosial Dan Pengurangan Kemiskinan Di Rumah Tangga Perdesaan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(2), 171. <https://doi.org/10.22212/jekp.v7i2.672>
- Nur, M. Y. R. P. (2022). Peranan Pemerintah dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pare-Pare Perspektif Siyasa Dusturiyah Tasyiriyyah. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare.
- Rahadi, A., Al Musadieg, M., & Susilo, H. (2014). ANALISIS DAN DESAIN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BARANG BERBASIS KOMPUTER (Studi Kasus pada Toko Arta Boga). In *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* (Vol. 8, Issue 2).
- Dinas Sosial Kabupaten Pinrang. (2021). Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024.
- Salsabila, Q., Purba, G., & Saragih, S. E. (2022). *Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tanjung Pinang 1. 3*, 132–141. <https://doi.org/10.46730/japs.v3i3.85>
- Sari, N., Anhar, D., & Hamdie, A. N. (n.d.). *PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN PENGEMIS DI KOTA BANJARBARU*.
- Sari, D. Y. dan AA Bakar. (2020). Efektifitas Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Tulungagung (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 4 (1): 63-76.

Sudiarti, S., & Nasution, E. I. (2022). Analysis of the Role of Social Services in Handling Homeless Beggars (GEPENG) in Medan City (Case Study of Medan City Social Service). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), 861–866. <https://doi.org/10.53697/emak.v3i3.610>

Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia : mengagas model jaminan sosial universal bidang kesehatan*. Alfabeta. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000797475602688.bib?lang=ja>

Zamharira, C., & Arantika, D. P. (2018). Peran Dinas Sosial dalam menanggulangi Pengemis di Kota Banda Aceh. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 4(1), 115–128. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/index/index>



LAMPIRAN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Muh. Hikml
Nim : 105611107020
Program Studi : ilmu administrasi negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	2 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 27 Mei 2024

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursinah Baridim, M.I.P.
NBM. 964591

Muh Hikmal 105611107020 BAB I

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	2%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	docplayer.info Internet Source		2%
2	www.kompasiana.com Internet Source		1%
3	alifakhrurrozi.wordpress.com Internet Source		1%
4	repository.ipb.ac.id Internet Source		1%
5	www.coursehero.com Internet Source		1%
6	media.neliti.com Internet Source		1%
7	core.ac.uk Internet Source		<1%
8	dspace.uii.ac.id Internet Source		<1%
9	es.scribd.com Internet Source		<1%

10	library.binus.ac.id Internet Source	<1 %
11	mavi-net.org Internet Source	<1 %
12	pascasarjana.warmadewa.ac.id Internet Source	<1 %
13	seminarap2011.wordpress.com Internet Source	<1 %
14	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
15	www.vingle.net Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



Muh Hikmal 105611107020 BAB II

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source		18%
2	stp-mataram.e-journal.id Internet Source		1%
3	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper		1%
4	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper		1%
5	pemkomedan.go.id Internet Source		<1%
6	core.ac.uk Internet Source		<1%
7	eprints.uny.ac.id Internet Source		<1%
8	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source		<1%
9	www.scribd.com Internet Source		<1%



10 pt.slideshare.net **<1** %
Internet Source

11 repository.radenintan.ac.id **<1** %
Internet Source

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off



Muh Hikmal 105611107020 BAB III

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to UIN Raden Irnan Lampung
Student Paper

4%

2

docplayer.info
Internet Source

2%

3

Submitted to Universitas Pendidikan
Indonesia
Student Paper

2%

4

pt.scribd.com
Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



Muh Hikmal 105611107020 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

2% SIMILARITY INDEX **2%** INTERNET SOURCES **0%** PUBLICATIONS **0%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	peta-peta1.blogspot.com Internet Source		1%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source		<1%
3	adoc.pub Internet Source		<1%
4	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper		<1%
5	moam.info Internet Source		<1%
6	studylib.net Internet Source		<1%
7	www.fotoimena.com Internet Source		<1%
8	ejournal.uin-suska.ac.id Internet Source		<1%
9	fajarfebrianto93.blogspot.com Internet Source		<1%

10	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1%
11	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1%
12	media.neliti.com Internet Source	<1%
13	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1%
14	es.scribd.com Internet Source	<1%
15	www.ejurnal.stmik-budidarma.ac.id Internet Source	<1%
16	www.kompasiana.com Internet Source	<1%
17	www.readbag.com Internet Source	<1%
Exclude quotes		Off
Exclude bibliography		Off
Exclude matches		Off

Muh Hikmal 105611107020 BAB V

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



hidupgaya.co
Internet Source



2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 0866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3748/05/C.4-VIII/II/1445/2024

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

26 February 2024 M

16 Sya'ban 1445

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0203/FSP/A.1-VIII/II/1445/2024 tanggal 26 Februari 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUH HIKMAL

No. Stambuk : 10561 1107020

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PINRANG"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 29 Februari 2024 s/d 29 April 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Ketua LP3M,

Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.

NBM 1127761



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 4582/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Pinrang
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	Cq. Kepala DPMPSTP Kab. Pinrang

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3748/05/C.4-VIII/II/1445/2024 tanggal 26 Februari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MUH HIKMAL
Nomor Pokok	: 105611107020
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin No 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PINRANG "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **05 Maret s/d 05 Mei 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 27 Februari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Nomor: 4582/S.01/PTSP/2024

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :

<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



NOMOR REGISTRASI 20240227995763



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



PEDOMAN WAWANCARA

No	Indikator	Pertanyaan
1	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pihak Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang sudah melakukan perencanaan terstruktur mengenai penanganan gelandangan dan pengemis di Ibukota Kabupaten Pinrang? (Dinas Sosial) 2. Bagaimana bentuk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang dalam penangana gelandangan dan pengemis? (Dinas Sosial)
2	Pemberian Pengarahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang sudah melakukan pemberian pengarahan kepada gelandangan dan pengemis? (Dinas Sosial) 2. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam memberikan pengarahan kepada gelandangan dan pengemis yang ada di Ibukota Kabupaten Pinrang? (Dinas Sosial) 3. Bagaimana tanggapan anda mengenai pemberian penagarahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang? (gelandnagan dan pengemis) 4. Apakah pemberian Penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Sudah efektif dan bermanfaat untuk anda? (Gelandangan dan pengemis)
3	Pemberian Bimbingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang sudah memberikan bimbingan kepada gelandangan dan pengemis? (Dinas Sosial) 2. Bagaimana langkah-langkah pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap gelandangan dan pengemis? (Dinas Sosial) 3. Bagaimana tanggapan anda mengenai bimbingan yang diberikan oleh Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang? (gelandangan dan pengemis) 4. Apakah pemberian Bimbingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial sudah efektif dan bermanfaat untuk anda? (gelandangan dan pengemis)

		dan pengemis)
4	Pemberian Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Dinas Sosial Ibukta Kabupaten Pinrang sudah mengadakan pemberian latihan kepada para gelandangan dan pegemis? (Dinas Sosial) 2. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang dalam pemberian pelatihan kepada gelandangan dan pengemis? (Dinas Sosial) 3. Bagaimana tanggapan anda mengenai pemberian pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial Ibukota Kabupaten Pinrang? (gelandangan dan pengemis) 4. Apakah pemberian pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial sudah efektif dan bermanfaat untuk anda? (gelandnagan dan pengemis)





Said Muhayang S.Sos (Pekerja Sosial Ahli Muda)



Nurpelita (Pekerja Sosial Ahli Muda)



Sapriadi (Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial)



Muliadi (Operasional dan Pengendalian)



Randi (22 Tahun)



Samsuddin (59 Tahun)



Jamaluddin (52 tahun)



Arya dan Revan (17 dan 16 tahun)

RIWAYAT HIDUP



Muh Hikmal lahir pada tanggal 5 Mei 2003, di desa samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi selatan merupakan anak ke empat dari pasangan bapak Nasir dan ibu Jarah

penulis menempuh pendidikan sekolah dasar Di SdD 65 Katteong pada tahun 2008-2014, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs DDI Patobong pada tahun 2014-2017, setelah lulus dari MTs, penulis lalu melanjutkan pendidikan pada SMAN 3 Pinrang pada tahun 2017 dengan memilih jurusan Matematika dan Ilmu Alam (MIA) dan lulus pada tahun 2020, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dengan mengambil Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Atas ridho Allah SWT, serta dengan pengorbanan dan kerja keras penulis akan mengakhiri masa perkuliahan Sarjana Strata Satu (S1) dengan judul skripsi **“Analisis Peran Dinas sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis Di Ibukota Kabupaten Pinrang”**.